

**PELAKSANAAN *UPAH TALAK* DI KEC. KUANTAN MUDIK
KAB. KUANTAN SINGINGI MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Perbandingan Antara Desa Pangkalan dan
Desa Muara Petai)**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Dan Melengkapi
Syarat-Syarat Guna Meraih Gelar
Sarjana Hukum Islam**



OLEH

**MARDINIS
NIM 10223020059**

**PROGRAM STRATA 1
JURUSAN PERBANDINGAN HUKUM DAN MAZHAB**

**FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2009**

A B S T R A K

Skripsi ini berjudul: **"Pelaksanaan Upah Talak di Kec. Kuantan Mudik Menurut Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai)".**

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pengamatan penulis tentang adanya praktek pernikahan yang dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi yng lazim mereka sebut dengan *Upah Talak*.

Upah Talak adalah praktek yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang telah ditalak tiga suaminya. Pernikahan ini biasanya tidak berlangsung lama dan laki-laki yang mau menikahi perempuan yang telah ditalak tiga tadi biasanya mendapatkan bayaran atas kemauannya untuk menikahi dan mentalak perempuan tersebut.

Penelitian ini mengambil lokasi Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai. Lokasi ini diambil karena ada perbedaan di kedua desa tersebut dalam masalah *Upah Talak*. Masyarakat Desa Pangkalan terkesan lebih tertutup terhadap *Upah Talak*, sehingga tidak ada masyarakatnya yang melaksanakan *Upah Talak* di desa tersebut, sementara masyarakat Desa Muara Petai lebih terbuka sehingga masyarakatnya tidak segan untuk melaksanakan *Upah Talak* di desanya sendiri.

Dari latar belakang di atas, permasalahan yang diteliti adalah bagaimana pelaksanaan *Upah Talak* di Kecamatan Kuantan Mudik, dengan membandingkan pelaksanaan dan persepsi masyarakat terhadap *Upah Talak*, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Populasi dari penelitian ini adalah para pelaku *Upah Talak* yang didata sejak tahun 2000 yang berjumlah 10 pasang, masing-masing 5 pasang di tiap desa. Untuk pasangan ini semua populasi dijadikan sampel. Sedangkan dari masyarakat, diambil 100 Orang sebagai sampel

Dalam penelitian ini diperoleh dari dua sumber, yaitu : data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari responden, dengan cara mewawancarai para pelaku *Upah Talak*, juga menyebarkan angket kepada beberapa orang anggota masyarakat. Data Sekunder adalah data yang diperoleh dari informan

yang ada hubungannya dengan judul yang diteliti. Selain itu, juga diperoleh dari perpustakaan dengan cara memperhatikan dan mengkaji kitab-kitab dan literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan ini dan dari ulama setempat

Data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan metode angket yang dianalisa dengan metode kuantitatif, serta data wawancara, observasi, dan studi kepustakaan yang dianalisa dengan menggunakan metode kualitatif. Penulisan dalam penelitian ini menggunakan metode induktif, deduktif, deskriptif dan komparatif.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap *Upah Talak* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap pelaksanaan *Upah Talak* di Kecamatan Kuantan Mudik.

Dari penelitian ini dihasilkan suatu temuan bahwa walaupun masyarakat Desa Pangkalan mempunyai persepsi yang berbeda dengan masyarakat Desa Muara Petai dalam memandang *Upah Talak*, akan tetapi pelaksanaan *Upah Talak* yang dilakukan oleh warga Desa Pangkalan sama dengan pelaksanaan *Upah Talak* di Desa Muara Petai.

Dari hasil penelitian ini, didapati bahwa, *Upah Talak* yang terjadi dalam masyarakat Kuantan Mudik bertentangan dengan ajaran Islam, karena *Upah Talak* dalam terminologi masyarakat Kuantan Mudik adalah Nikah Tahlil dalam terminologi Fikih Islam.

DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
Abstrak	i
Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	vi
Daftar Tabel	ix
 BAB I Pendahuluan	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Batasan Masalah	8
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
E. Metode Penelitian	9
F. Sistematika Penulisan.....	13
 BAB II Profil Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai	 15
A. Desa Pangkalan	15
1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat	15
2. Geografis dan Demografis	16
3. Pendidikan	16
4. Keagamaan	17
5. Adat Istiadat	19
6. Sosial Ekonomi	20

B. Desa Muara Petai	20
1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat	20
2. Geografis dan Demografis	21
3. Pendidikan	22
4. Keagamaan	23
5. Adat Istiadat	23
6. Sosial Ekonomi	24
 BAB III Tinjauan Umum Tentang Nikah dan Talak	25
A. Nikah.....	25
1. Pengertian Nikah	25
2. Hukum dan Dasar Hukum Nikah	26
3. Rukun dan Syarat Nikah	28
4. Bentuk Pernikahan yang Dilarang Islam	30
5. Tujuan Islam Dalam Pernikahan	42
B. Talak	44
1. Pengertian Talak	44
2. Hukum dan Dasar Hukum Talak	45
3. Rukun dan Syarat Talak	48
4. Macam-macam Talak	49
C. Nikah dan Talak Dalam Hukum Positif	51
1. Dasar dan Syarat Perkawinan	53
2. Pencegahan, Pembatalan dan Perjanjian Perkawinan	57
3. Perceraian	58

BAB IV Pelaksanaan Upah Talak di Kec. Kuantan Mudik	63
A. Pelaksanaan <i>Upah Talak</i> di Desa Pangkalan dan Muara Petai ...	50
B. Persepsi masyarakat terhadap <i>Upah Talak</i>	75
C. Tinjauan Hukum Islam..	79
BAB V Penutup	89
A. Kesimpulan	89
B. Saran	90
Daftar Pustaka	91
Lampiran-lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah suatu peristiwa yang sangat penting dan sangat sakral dalam kehidupan manusia, tak terkecuali bagi seorang muslim. Bagi seorang muslim melaksanakan perkawinan merupakan suatu ibadah jika dilakukan atas perintah Allah dan Rasul-Nya. Di Indonesia perkawinan yang sejalan dengan ajaran Islam telah diatur dan diformalkan dalam bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam undang-undang tersebut, pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa.¹

Selanjutnya perkawinan itu dikatakan sah, sebagaimana yang diterangkan dalam pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, apabila dilakukan menurut hokum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.² Tegasnya, perkawinan ialah suatu akad atau perikatan untuk menghalalkan hubungan kelamin antara laki-laki dan perempuan dalam rangka mewujudkan kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa

¹ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001), h. 131.

² *Ibid*

ketenteraman (*sakinah*), dan kasih sayang (*mawaddah wa rahmah*) dengan cara yang diridhai Allah SWT.³

Manusia diciptakan Allah SWT mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Dalam pada itu manusia diciptakan oleh Allah SWT untuk mengabdikan dirinya kepada Khaliq dalam segala aktifitas hidupnya. Pemenuhan kebutuhan biologis termasuk salah satu naluri manusiawi di samping juga sebagai suatu aktifitas dalam mempertahankan eksistensi jenisnya di muka bumi. Agar manusia bisa memenuhi nalurnya dan tetap dalam fitrahnya sebaga hamba Allah, maka Allah SWT mengatur kehidupan manusia dalam hal perkawinan.⁴

Dengan demikian, aturan perkawinan menurut Islam merupakan tuntunan agama yang perlu mendapat perhatian, sehingga tujuan melangsungkan perkawinan pun hendaknya ditujukan untuk memenuhi petunjuk agama. Sehingga kalau diringkas ada dua tujuan orang melangsungkan perkawinan ialah memenuhi nalurnya dan memenuhi petunjuk agama.

Suatu perkawinan dimaksudkan untuk menciptakan kehidupan suami isteri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina keluarga yang sejahtera dan bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami isteri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dibuhul dengan akad perkawinan itu semakin kokoh terpatri sepanjang hayat masih dikandung badan. Namun

³Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI, 1984), h. 49.

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003), h. 22.

demikian kenyataan hidup membuktikan bahwa memelihara kelestarian dan kesinambungan hidup bersama suami isteri itu bukanlah perkara yang mudah dilaksanakan, bahkan dalam banyak hal kasih sayang dan kehidupan yang harmonis antara suami isteri itu tidak dapat diwujudkan. Terkadang munculnya perbuatan perubahan pandangan hidup yang berbeda antara suami dan isteri, timbulnya perselisihan pendapat keduanya serta berubahnya kecendrungan hati pada masing-masing pasangan memungkinkan timbulnya krisis rumah tangga yang merubah suasana harmonis menjadi percekocokan, persesuaian menjadi percekocokan, kasih sayang menjadi kebencian, kesemuanya merupakan hal-hal yang harus ditampung dan diselesaikan.⁵

Apabila krisis rumah tangga yang melanda kehidupan suami isteri itu sedemikian memuncak dan tidak mungkin diselesaikan selain harus bercerai atau diceraikan,⁶ dan jalan inilah yang paling menjamin kemaslahatan, baik kemaslahatan suami, isteri maupun anak-anak, maka untuk itu putusnya perkawinan adapat dimungkinkan, walaupun sesungguhnya perceraian atau thalak tidak disukai oleh Allah , sebagaimana hadis Rasulullah yang berbunyi :

ابغض الحلال عند الله الطلاق (رواه ابو داود و ابن ماجه)

Artinya : perbuatan halal yang paling dibenci Allah adalah thalak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah).⁷

⁵ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *op., cit.*, h. 220-221.

⁶ Dalam Islam ada tiga bentuk perceraian, yaitu *Talak* dari suami, *Khulu'* (gugatan cerai dari isteri, dan *Fasakh* (perceraian berdasarkan keputusan pengadilan).

⁷ Hasan Ayyub, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. Ke-5, h. 209.

Seorang suami yang telah menggauli isterinya, maka ia berhak tiga kali talak. Seorang suami dilarang untuk menjatuhkan talak tiga sekaligus, karena jika suami menjatuhkan talak tiga sekaligus berarti ia telah menutup pintu untuk kembali dan bertemu lagi di saat ia menyesali perbuatannya, karena orang yang menjatuhkan talak tiga berarti telah merugikan wanita, karena telah menjadikan si wanita tidak sah dinikahi oleh dirinya (laki-laki).⁸

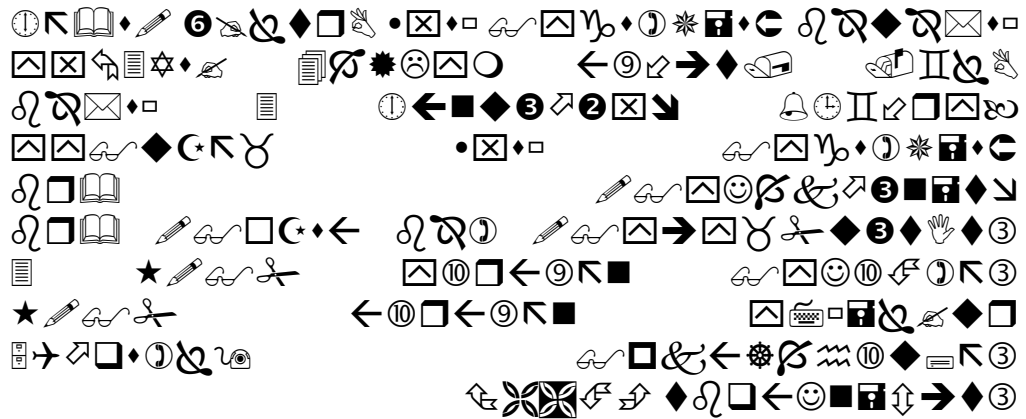
Islam telah mengatur umatnya bagaimana cara menjatuhkan talak yang dianjurkan, sehingga dalam kitab fiqih kita mengenal istilah talak *Sunni* (Talak yang diajarkan syara') dan talak *Bid'i* (Talak yang dijatuhkan dalam kondisi yang diharamkan syara'). Talak *sunni* adalah talak yang dijatuhkan secara bertahap (ditalak satu-satu) dan talak yang diajatkan pada masa suci yang belum digauli (jelas bahwa isteri dalam keadaan tidak hamil). Sedangkan talak *Bid'i* adalah talak yang dijatuhkan tiga sekaligus, atau talak yang dijatuhkan dalam masa haid atau nifas, dan juga talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang sudah digauli dan belum jelas apakah dia hamil atau tidak.⁹

Dalam Islam, apabila salah seorang suami telah mentalak isterinya tiga kali (*Thalaq Ba'in Kubra*), maka wanita tersebut haram baginya untuk dinikahi sampai ia menikah lagi dengan laki-laki lain, berhubungan badan dengan suaminya tersebut, dan sudah bercerai dan habis masa `iddahnya

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah* (terj), (Bandung : al-Ma`arif, 1980), cet. Ke-1, h. 48.

⁹ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (terj.), (Jakarta : Gema Insani Press, 2006), h. 702.

dengan suaminya yang kedua tersebut. Hal ini didasarkan pada firman Allah surat al-Baqarah ayat 230 :



Artinya : Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui.¹⁰

Dari ayat di atas dapat dipahami bahwa ada saatnya wanita yang telah ditalak tiga menjadi halal bagi suaminya yang pertama (mentalaknya), akan tetapi harus terlebih dahulu melalui beberapa syarat yang telah ditentukan. Syarat-syarat tersebutlah yang digariskan oleh surat al-Baqarah ayat 230 di atas.

Di dalam Islam juga dilarang untuk menghalalkan isteri yang telah ditalak tiga dengan cara nikah *tahlil*. Nikah *tahlil* adalah nikah yang dilakukan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan niat agar wanita itu halal (boleh) melakukan perkawinan

¹⁰ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran al-Qur'an, 1997), cet. Ke-9, h. 56.

dengan bekas suaminya yang pertama, setelah suami yang kedua menceraikannya dan habis masa `iddahnya.¹¹

Perceraian merupakan hal lumrah yang terjadi di tengah masyarakat, dengan berbagai pertimbangan, terkadang pasangan suami isteri memilih jalan perceraian sebagai jalan keluar dari persoalan rumah tangga yang mereka hadapi. Kemudian, dengan kesadaran dan beberapa alasan, tidak sedikit pasangan suami isteri yang telah bercerai memutuskan untuk rujuk kembali, dan tidak jarang hal tersebut berlangsung sampai tiga kali, batas maksimal talak yang ditetapkan oleh syara'.¹² Seperti yang terjadi di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai. Di dua desa ini, ada beberapa kasus yang dijumpai, seorang suami yang telah mentalak isterinya tiga kali, ingin kembali lagi ke ikatan perkawinan yang dulu pernah mereka bina. Alasan yang dikemukakan berbagai macam, ada yang ingin kembali karena masih sayang sama isteri, ada yang karena mempertimbangkan kebaikan anak dari buah perkawinan mereka dan lain sebagainya.¹³

Beberapa kasus *Upah Talak* pernah penulis temukan di dua desa tersebut. Di Desa Pangkalan, Rasid (35 tahun) telah mentalak tiga isterinya, Mastuti (32 tahun). Dengan berbagai pertimbangan ia ingin kembali lagi ke pangkuan mantan isterinya tersebut. Untuk itu Rasid meminta Buyung,

¹¹ Dalam istilah fiqih, suami pertama disebut *Muhallal lah* dan suami yang kedua disebut *Muhallil*. Lihat ¹¹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), h. 1347.

¹² Sebagaimana dijelaskan di atas, suami tidak boleh rujuk lagi setelah talak ketiga yang ia jatuhkan.

¹³ Zainir (Pemuka Masyarakat), *Wawancara*, Teluk Petai, 13 September 2007.

seorang perantau dari Timpe (Sumatra Barat) untuk menikahi Mastuti. Saat ini Rasid telah kembali ke ikatan perkawinan mereka.¹⁴

Kasus lain terjadi di Desa Muara Petai. Isap (30 tahun) telah bercerai dengan talak tiga dengan isterinya Robi'a (27 tahun). Seperti yang dilakukan Rasid, Isap meminta Saipul untuk menikahi isterinya, agar ia bisa kembali ke pelukan Robi'a.¹⁵

Hal ini, sebagai mana dijelaskan di atas, tentunya tidak diperbolehkan di dalam Islam, kecuali isterinya telah menikah dan cerai lagi dengan laki-laki lain. Untuk bisa menikahi isterinya yang telah ditalak tiga tadi, beberapa cara dilakukan oleh para mantan suami di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai tersebut, seperti suatu praktek yang oleh masyarakat disebut *Upah Talak*.

Praktek *Upah Talak* yang terjadi di Desa Pangkalan sedikit berbeda dengan yang terjadi di Desa Muara Petai, di mana masyarakat Desa Pangkalan melaksanakan praktek Upah Talak di luar desanya karena terkesan tidak mendapatkan restu dari orang kampung dan pemuka masyarakat bahkan yang melakukan di kampung akan menjadi sorotan, sementara praktek *Upah Talak* di Desa Muara Petai dilaksanakan di Desa Muara Petai sendiri dan terkesan mendapat restu dari pemuka masyarakat, nenek mamak dan juga para alim ulama, hal ini bisa dilihat dari kehadiran mereka dalam akad nikah yang dilaksanakan oleh seorang suami yang telah mentalak tiga isterinya dan menikah lagi dengan orang lain.

¹⁴ Rasid, *Wawancara*, Pangkalan, 10 Juli 2007.

¹⁵ Robi'a, *Wawancara*, Muara Petai, 11 Juli 2007.

Dari pemaparan di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam tentang permasalahan tersebut dan menuangkannya dalam bentuk skripsi dengan judul : **"Pelaksanaan Upah Talak di Kec. Kuantan Mudik Menurut Hukum Islam (Studi Perbandingan Antara Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai)"**.

B. Batasan Masalah

Permasalahan yang berhubungan dengan pernikahan dalam Islam merupakan permasalahan yang sangat beragam. Oleh karena itu, untuk menghasilkan tingkat validitas yang tinggi dan kupasan yang lebih mendalam, serta mengingat keterbatasan waktu, tenaga dan finansial, maka permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini difokuskan kepada : persoalan *Upah Talak* di Kec. Kuantan Mudik Menurut Hukum Islam.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pembatasan masalah di atas, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan dibahas. Permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana pelaksanaan upah talak di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai Kecamatan Kuantan Mudik,
2. Bagaimana Perbandingan pelaksanaan *Upah Talak* di kedua desa tersebut,
3. Bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan dari penelitian adalah :
 - a. Untuk mengetahui lebih mendalam bagaimana pelaksanaan Upah Talak di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai Kec. Kuantan Mudik,

- b. Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pelaksanaan *Upah Talak* di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai,
 - c. Untuk mengetahui bagaimana hukum Islam terhadap pelaksanaan Upah Talak di Kec. Kuantan Mudik.
2. Adapun kegunaan dari penelitian adalah :
- a. Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam dari Fakultas Syari`ah dan Ilmu Hukum UIN SUSKA Riau,
 - b. Sebagai sumbangan pemikiran dalam khazanah ilmu pengetahuan dan hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah literatur skripsi tentang hukum islam di perpustakaan UIN SUSKA Riau,
 - c. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk penelitian selanjutnya.

E. Metode Penelitian

Dalam rangka mengumpulkan, menyusun dan mengolah data dalam tulisan ini, penulis menggunakan metode sebagai berikut :

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan mengambil lokasi Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi. Lokasi ini dipilih dengan alasan dan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Lancarnya akses transportasi menuju dua Desa ini, sehingga akan memudahkan penulis untuk melakukan aktifitas penelitian,

- b. Upah Talak merupakan salah satu tradisi yang masih dijalankan di dua Desa ini,
- c. Penduduk Desa ini merupakan masyarakat yang teguh memegang agama dan adat istiadat,
- d. Penulis berdomisili di salah satu Desa ini (Desa Pangkalan), sehingga memudahkan bagi penulis untuk berkomunikasi dan mendapatkan data dan informasi untuk keperluan penelitian ini.

2. Subyek dan Obyek Penelitian

Subyek penelitian ini adalah masyarakat desa Pangkalan dan Desa Muara Petai sedangkan obyek penelitian ini adalah pelaksanaan tradisi *Upah Talak* di desa Pangkalan dan Desa Muara Petai

3. Populasi dan Sampel

Dari data yang penulis peroleh, yaitu sejak tahun 2000 sampai tahun 2008, di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, terdapat sepuluh kasus upah talak, masing-masing lima kasus di Desa Pangkalan dan lima kasus di Desa Muara Petai. Orang-orang yang terlibat dalam kasus tersebut, yaitu isteri, suami pertama dan suami kedua semuanya dijadikan sample dalam penelitian ini, di samping pemuka masyarakat dan pemuka agama. Di samping itu, populasi seluruh masyarakat Desa Pangkalan berjumlah 1.820 jiwa dan Desa Muara Petai berjumlah 1.671 jiwa. Dari semua populasi tersebut, diambil sampel sebanyak 100 orang untuk menjawab angket yang penulis sebar. Sampel ditarik dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yaitu menetapkan sample

berdasarkan kebutuhan penelitian. Untuk mempertajam data, penulis juga mewawancarai para penduduk, dan untuk itu sample ditarik dengan teknik *Accidental Sampling*.¹⁶

4. Sumber Data

Data dalam penelitian dapat dikelompokkan kepada dua kelompok, yaitu :

a. Data Primer

Data Primer diperoleh dari responden, yaitu dengan memberikan angket dan mewawancarai masyarakat yang pernah melakukan tradisi *Upah Talak* dan pemuka masyarakat yang tahu dengan asal usul dan pelaksanaan tradisi *Upah Talak*.

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data pendukung yang diperoleh dari masyarakat umum, dan data kepustakaan dari literature-literatur atau kitab-kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang diteliti.

5. Metode Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa metode, yaitu :

a. Angket, yaitu membuat sejumlah pertanyaan tertulis yang diajukan kepada responden guna mendapatkan informasi tentang permasalahan yang diteliti,

b. Wawancara, penulis mengajukan pertanyaan langsung kepada responden dan informan penelitian, yaitu masyarakat yang pernah

¹⁶ Teknik Accidental Sampling adalah mewawancarai responden yang sempat ditemui pada tempat dan waktu yang tidak ditentukan. Lihat Manasse Malo, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : LP FISIP UI, 1987), cet. Ke-6, h. 106.

melakukan tradisi *Upah Talak* dan masyarakat umum, pemuka masyarakat dan pemuka agama. Wawancara lebih difokuskan pada tata cara pelaksanaan *Upah Talak* sehingga didapatkan gambaran yang jelas tentang pelaksanaan *Upah Talak* itu sendiri serta difokuskan pada penajaman dan perluasan pertanyaan yang disebarakan melalui angket, sehingga data yang diperoleh melalui angket dihubungkan atau diperkuat oleh data-data yang diperoleh hasil wawancara,

- c. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap pelaksanaan *Upah Talak* di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai. Karena penulis hidup di tengah masyarakat *Pangkalan dan Desa Muara Petai*, maka pengalaman penulis terhadap pelaksanaan *Upah Talak* juga bisa dijadikan data yang didapat melalui observasi,
- d. Studi kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti kitab-kitab yang berhubungan dengan masalah yang diteliti.

6. Metode Penulisan

Setelah data diperoleh, maka data tersebut akan penulis bahas dengan menggunakan metode-metode sebagai berikut :

- a. deskriptif analitis, yaitu mengumpulkan data, kemudian menyusun, menjelaskan dan menganalisisnya,
- b. induktif, yaitu menggambarkan data-data khusus yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, dianalisa kemudian diambil kesimpulan secara umum,

- c. deduktif, menggambarkan kaidah-kaidah umum yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara umum,
- d. Komparatif, yaitu membandingkan data yang diperoleh di Desa Pangkalan dengan data yang diperoleh di Desa Muara Petai.

7. Metode Analisa Data

Metode analisa data yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah :

- a. Kualitatif, yaitu mengumpulkan data-data yang telah ada, kemudian data-data tersebut dikelompokkan ke dalam kategori-kategori berdasarkan persamaan jenis data tersebut, dengan tujuan dapat menggambarkan permasalahan yang akan diteliti secara utuh, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendapat atau teori para ahli yang relevan. Metode analisa ini digunakan terutama terhadap data-data yang didapatkan dari hasil wawancara dan survey,
- b. Kuantitatif, yaitu analisa data terhadap data-data dari angket. Data-data yang terkumpul setelah diedit dan dikode, ditabulasi dan diberi persentase pada table, diinterpretasikan sehingga diperoleh pemahaman yang utuh dari data hasil penelitian.

F. Sistematika Penelitian

Untuk mempermudah penulisan dan pembahasan dalam penelitian ini, maka penelitian ini dibagi kepada beberapa bab sebagai berikut :

- BAB I : Pendahuluan, yang berisi Latar Belakang Masalah, Batasan Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Metode Penelitian serta Sistematika Penulisan.
- BAB II : Profil Lokasi Penelitian, Yaitu Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai Kec. Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi, meliputi kondisi geografis dan demografis, Pendidikan, keagamaan, sosial budaya dan perekonomian.
- BAB III : Tinjauan Umum Tentang Nikah dan Talak, meliputi pengertian, hukum dan dasar hukum Nikah, rukun dan syarat nikah, bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, Tujuan Islam dalam pernikahan, pengertian, Hukum dan dasar hukum talak, Rukun dan syarat talak serta macam-macam talak.
- BAB IV : Analisa, Yaitu Pelaksanaan Tradisi *Upah Talak* di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, Persepsi masyarakat tentang *Upah Talak* dan bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.
- BAB V : Kesimpulan dan Saran.

Daftar Pustaka

BAB II

PROFIL DESA PANGKALAN DAN DESA MUARA PETAI

A. DESA PANGKALAN

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat

Desa Pangkalan adalah dua desa yang bertetangga yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi. Terbentuknya desa ini dipercaya masyarakat mempunyai sejarah. Ada sejarah yang melatarbelakangi penamaan desa tersebut.

Penamaan Desa Pangkalan dilatarbelakangi oleh kisah dua orang datuk yang bernama Ji Kesa dan Ji Pokiah. Kedua orang datuk ini berasal dari Peranap dan merekalah yang dipercaya sebagai orang yang pertama kali membuka daerah yang sekarang dikenal dengan nama Desa Pangkalan. Daerah yang mereka tempai ketika itu berada di pertengahan desa lain dan terletak di hulu Sungai Peranap yang bernama Sungai Tiu. Karena terletak di pertengahan maka desa ini mempunyai letak yang strategis. Kemanapun harus melalui desa ini, baik itu ke Desa Ibul, Jao, Sungkai atau ke Desa Timpe mesti melewati desa ini dulu. Begitu juga kalau ingin ke Desa Muara Petai atau ke Desa Setiang. Karena itu, dua orang datuk ini memberi nama daerah yang mereka tempati dengan nama Desa Pangkalan.¹

¹ H. Syamsuddin (Pemuka masyarakat Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 2 Desember 2008.

2. Geografis dan Demografis

Penduduk Desa Pangkalan berjumlah 1.820 dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

TABEL I
JUMLAH PENDUDUK DESA PANGKALAN
DAN DESA MUARA PETAI

Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
882	48,5 %	938	51,5 %	1.820

Sumber : Kantor Kepala Desa Pangkalan

Dari jumlah penduduk tersebut, rata-rata adalah suku Melayu yang merupakan suku pribumi dan sebagian berasal dari luar daerah yang telah lama menetap di daerah tersebut, terutama dari daerah Sumatra Barat.

Adapun batas-batas wilayah Desa pangkalan adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Ibul
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Muara Petai
- Sebelah Timur berbatas dengan Hutan lindung
- Sebelah Barat berbatas dengan PT Rimba Lazuardi/Hutan Lindung

3. Pendidikan

Pendidikan mempunyai peran yang sangat penting bagi suatu Bangsa dan merupakan sarana untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan manusia. Untuk mempersiapkan sumber daya manusia yang berkualitas, maka pendidikan merupakan faktor yang sangat penting ditingkatkan, baik oleh pemerintah maupun oleh masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan yang

sedang dilaksanakan di Indonesia, tidak akan terwujud bila sumber daya manusianya tidak disipakan dengan baik. Di sisi lain pendidikan merupakan sarana yang ampuh dalam mempersiapkan tenaga kerja yang profesional. Dengan tingkat pendidikan yang semakin baik, setiap orang akan dapat secara langsung memperbaiki tingkat kehidupan yang layak, sehingga kesejahteraan masyarakat akan semakin cepat dapat diwujudkan.

Kesadaran masyarakat untuk menekuni pendidikan di Desa Pangkalan masih terbilang rendah. Hal ini terbukti dengan masih banyaknya masyarakat dengan tingkat pendidikan yang masih rendah, bahkan ada di antara masyarakat yang tidak pernah sekolah sama sekali. Kondisi ini tentunya juga dipengaruhi oleh sarana pendidikan yang ada di desa tersebut. Untuk melihat lebih jelas kondisi sarana pendidikan di Desa Pangkalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL II
SARANA PENDIDIKAN DI DESA PANGKALAN

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	MDA	1
3.	SLTP/MTS	1
4.	SLTA/MA	1
5.	SLB/Paket A	1

4. Keagamaan

Masyarakat asli Desa Pangkalan 100 % menganut agama Islam semenjak dahulu secara turun temurun dari nenek moyang mereka. Walaupun

ada yang beragama non muslim, itu hanyalah pekerja dari luar daerah yang bekerja perusahaan dan biasanya mereka tidak berani mengemukakan identitas agamanya. Dalam beribadah, menurut pemuka agama di Desa Pangkalan, masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai beramal menurut mazhab Syafi'i seperti masyarakat Indonesia pada umumnya. Hal ini terjadi karena memang dari dahulunya amalan yang dipakai di desa ini adalah amalan menurut mazhab syafi'i, di samping para pemuka agama juga hanya memperkenalkan mazhab syafi'i kepada masyarakat, sehingga mazhab syafi'i seolah menjadi mazhab resmi yang dijalankan di tengah masyarakat.²

Dalam melaksanakan kegiatan keagamaan masyarakat ditunjang dengan sarana-sarana ibadah seperti masjid dan mushalla. Untuk melihat lebih jelas jumlah masjid dan mushalla di Desa Pangkalan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL III
JUMLAH RUMAH IBADAH DI DESA PANGKALAN

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	1

Pada tempat peribadatan tersebut masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah islam, wirid ibu-ibu, wirid remaja, pendidikan al-Qur'an, pendidikan anak-anak tentang keagamaan serta peringatan hari-hari besar Islam.

² Syahril (Muballigh Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 19 Oktober 2008.

Pembangunan sarana ibadah ini pada umumnya merupakan hasil swadaya masyarakat, dan hanya sebagian kecil yang mendapat bantuan dari lembaga pemerintahan seperti Departemen Agama dan Pemerintahan Daerah TK II serta Pemerintahan TK I Riau ataupun perusahaan yang ada di sekitar Desa Pangkalan.

5. Adat Istiadat

Di samping menganut agama Islam, Masyarakat Desa Pangkalan terikat oleh aturan-aturan adat yang mereka warisi dari pemimpin adat mereka. Adat itu merupakan kebiasaan yang berlaku dalam hidup sehari-hari di dalam lingkungan masyarakat mereka yang tidak boleh dilanggar sedikitpun.

Masyarakat Desa Pangkalan masyarakat yang menisbahkan garis keturunannya kepada ibu (Matrilinial), artinya budaya yang berlaku dalam masyarakat adalah budaya Minangkabau, seperti dapat terlihat dalam sistem kekeluargaan atau sistem kekerabatan.

Di Desa Pangkalan terdapat beberapa suku yang masing-masing dipimpin oleh seorang pemuka adat, suku-suku tersebut adalah :

- Suku Domo dengan ninik mamak Datuk Panglimo Sutan
- Suku Chaniago dengan ninik mamak Datuk Aji Malano
- Suku Melayu dengan ninik mamak Datuk Panghulu Mudo
- Suku Patopang dengan ninik mamak Datuk Imau Barantai
- Suku Piliang dengan ninik mamak Datuk Paduko Bosau
- Suku Mandailiang dengan ninik mamak Datuk Paduko Majo

Adat istiadat ini di samping menjadi aturan hidup juga menjadi khazanah budaya yang sangat berharga. Di antara aspek-aspek adat yang menjadi budaya adalah upacara pernikahan, barzanji, balimau bakasai. Di samping itu, dalam masalah perkawinan dua orang yang mempunyai suku yang sama tidak dibenarkan untuk melangsungkan pernikahan.³

6. Sosial Ekonomi

Masyarakat Desa Pangkalan mempunyai mata pencarian yang berbeda-beda dalam memenuhi kebutuhan mereka sehari-hari. Namun sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, terutama petani karet dan kelapa sawit, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berprofesi lain, seperti karyawan PT yang ada di sekitar desa, buruh, tukang, pedagang, nelayan, pegawai negeri dan lain sebagainya.

Kewajiban untuk memenuhi nafkah keluarga biasanya dilakukan oleh seorang ayah atau suami sebagai kepala keluarga, namun di kedua desa ini, kadang-kadang sebagian ibu-ibu atau isteri juga ikut membantu suaminya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga.

B. DESA MUARA PETAI

1. Gambaran Umum dan Sejarah Singkat

Desa Muara Petai adalah dua desa yang bertetangga yang terletak dalam wilayah administratif Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan

³ Nawar Datuk Panglimo Sutan (Ninik Mamak Pasukuan Domo), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 30 Oktober 2008.

Singingi. Sebagaimana Desa Pangkalan, Terbentuknya desa ini juga dipercaya masyarakat mempunyai sejarah.

Penamaan Desa Muara Petai dilatarbelakangi oleh kisah seorang datuk yang bernama Datuk Kuaso. Datuk Kuaso dulunya menelusuri Batang Peranap hingga ke hulunya, hingga sampailah beliau di suatu tempat di mana pada tempat tersebut ditemukan sebuah sungai yang bermuara ke Batang Pranap. Di muara sungai tersebut terdapat sebatang pohon petai yang dianggap mempunyai keajaiban. Apabila air naik (banjir) maka buah petai tersebut sampai ke dalam air, akan tetapi apabila air surut dan dangkal buah petai tersebut juga sampai ke dalam air. Karena hal itu Datuk Kuaso menetap di daerah tersebut dan memberinya nama Desa Muara Petai.

2. Geografis dan Demografis

Penduduk Desa Muara Petai berjumlah 1.671 dengan perbandingan laki-laki dan perempuan sebagai berikut :

TABEL IV
JUMLAH PENDUDUK DESA MUARA PETAI

Laki-Laki		Perempuan		Jumlah
Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase	
769	46, 0 %	902	54, 0 %	1.671

Sumber : Kantor Kepala Desa Muara Petai

Komposisi masyarakat Desa Muara Petai menurut suku tidak jauh berbeda dengan komposisi masyarakat Desa Pangkalan, rata-rata adalah suku Melayu yang merupakan suku pribumi dan sebagian berasal dari luar daerah

yang telah lama menetap di daerah tersebut, terutama dari daerah Sumatra Barat.

Adapun batas-batas wilayah Desa Muara Petai adalah sebagai berikut :

- Sebelah Selatan berbatas dengan Desa Pangkalan
- Sebelah Utara berbatas dengan Desa Sitiang
- Sebelah Timur berbatas dengan Desa Pantai
- Sebelah Barat berbatas dengan Hutan Lindung

3. Pendidikan

Sebagaimana halnya Desa Pangkalan, Desa Muara Petai masih terbilang kurang maju dalam masalah pendidikan. Di samping karena kesadaran masyarakat untuk menekuni pendidikan masih terbilang rendah. Hal ini juga disebabkan karena kurangnya sarana pendidikan. Untuk melihat lebih jelas kondisi sarana pendidikan di Desa Muara Petai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL V
SARANA PENDIDIKAN DI DESA MUARA PETAI

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	SD	1
2.	MDA	1
3.	SLTP/MTS	1

Dari data di atas dapat diketahui, bahwa sarana pendidikan yang ada di Desa Muara Petai lebih minim jika dibandingkan dengan sarana pendidikan yang ada di Desa Pangkalan, hal ini berpengaruh terhadap tingkat pendidikan dan motivasi masyarakat untuk mengikuti pendidikan di lembaga formal.

4. Keagamaan

Masyarakat asli Desa Muara Petai sama dengan masyarakat asli Desa Pangkalan yang 100 % menganut agama Islam dan beribadah sesuai dengan amalan Mazhab Syafi'i. adapun sarana-sarana yang ada di Desa Muara Petai dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL VI
JUMLAH RUMAH IBADAH DI DESA MUARA PETAI

No	Rumah Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushalla	1

Pada tempat peribadatan tersebut masyarakat mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan, dakwah islam, wirid ibu-ibu, wirid remaja, pendidikan al-Qur'an, pendidikan anak-anak tentang keagamaan serta peringatan hari-hari besar Islam. Akan tetapi, berdasarkan pengamatan penulis, frekuensi kegiatan keagamaan yang dilaksanakan di Desa Muara Petai lebih sedikit dibandingkan dengan yang dilaksanakan di Desa Pangkalan.⁴

5. Adat Istiadat

Hukum dan peraturan adat yang berlaku di Desa Muara Petai sama dengan hukum dan peraturan adat yang berlaku di Desa Pangkalan. Akan tetapi wilayah kekuasaan adat Desa Muara Petai merupakan wilayah kekuasaan adat tersendiri yang terpisah dari wilayah kekuasaan adat Desa

⁴ Obesrvasi, Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, tanggal 3 s/d 10 November 2008.

Pangkalan, dengan kata lain datuk yang memegang pucuk pimpinan adat di Desa Pangkalan hanya membawahi kemenakan yang ada di Desa Pangkalan dan ninik mamak yang memegang pucuk pimpinan adapt di Desa Muara Petai hanya membawahi kemenakan yang ada di Desa Muara Petai. Namun walaupun demikian, gelar datuk yang dipakai untuk masing-masing suku sama di kedua desa tersebut.

6. Sosial Ekonomi

Secara sosial ekonomi, tidak ada perbedaan yang signifikan antara Masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, sebagian besar masyarakat berprofesi sebagai petani, terutama petani karet dan kelapa sawit, hanya sebagian kecil saja masyarakat yang berprofesi lain, seperti karyawan PT yang ada di sekitar desa, buruh, tukang, pedagang, nelayan, pegawai negeri dan lain sebagainya.

BAB III
TINJAUAN UMUM
TENTANG NIKAH DAN TALAK DALAM ISLAM

A. Nikah

1. Pengertian Nikah

Nikah menurut bahasa adalah *al-Dhamm* (الضم) yang berarti menghimpit dan *al-Jam`u* (الجمع) yang berarti berkumpul. Di samping itu, nikah juga bisa berarti watha' (bersetubuh) dan akad.¹ Sedangkan menurut

istilah, ada beberapa definisi yang dikemukakan oleh para ulama, yaitu :

- Imam Abu Hanifah mendefinisikan dengan suatu akad dengan tujuan memiliki kesenangan secara kesengajaan.
- Imam Malik ibn Anas mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan watha', dan menikmati apa saja yang ada pada diri seorang perempuan yang boleh dinikahinya.
- Imam Syafi'i mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad yang mengandung kebolehan watha' dengan menggunakan kata-kata "menikahkan" atau "mengawinkan" atau kata-kata yang semakna dengannya.

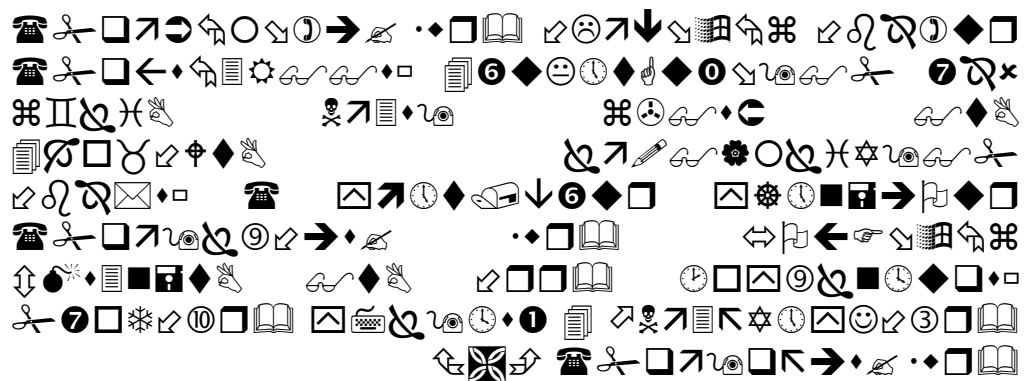
¹ Wahbah Zuhaili, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 1985), juz 7, cet. Ke-2, h. 29. lihat juga Ahmad Warson Muawwir, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-4, h. 210 dan 828.

- Imam Hanbali mengatakan bahwa nikah adalah suatu akad dengan menggunakan kata-kata nikah atau kawin untuk manfaat (menikmati) kesenangan.²

Walaupun redaksi yang dikemukakan oleh para ulama di atas berbeda, tetapi semuanya memiliki esensi yang sama, yaitu perjanjian yang kuat dan kokoh untuk hidup bersama secara sah antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga yang kekal, bahagia dan sejahtera di bawah naungan ridha Allah.³ Dalam pengertian yang luas, pernikahan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, untuk hidup bersama dalam suatu rumah tangga dan keturunan yang dilangsungkan menurut ketentuan-ketentuan syari'at Islam.⁴

2. Hukum dan Dasar Hukum Nikah

Ulama fikih berpendapat bahwa pada dasarnya hukum nikah itu adalah sunat. Hal ini didasarkan pada surat al-Nisa' ayat 3 :



² Abdurrahman al-Jaziri, *Kitab al-Fiqh `Ala al-Mazahib al-Arba`ah*, (Kairo : Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1979), juz 4, h. 2-4.

³ H. Ibnu Mas'ud dk, *Fiqh Mazhab Syafi'I*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000), h. 250.

⁴ M. Rifa'I, *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978), h. 453.

Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵

Para Mufassir dan ahli fikih mengatakan, sekalipun ayat di atas memakai lafaz ‘*Amr* (perintah),⁶ akan tetapi ada indikasi yang memalingkan hukumnya dari wajib menjadi sunat, yaitu adanya pilihan antara mengawini dua, tiga, empat atau satu.⁷

Namun walaupun demikian, ulama fikih merinci, bahwa ada lima hukum nikah, sesuai dengan keadaan orang yang akan melangsungkan pernikahan tersebut :

- Nikah bisa wajib bagi orang yang sudah mampu (siap lahir batin), dan nafsunya pun sudah mendesak sehingga dikhawatirkan ia akan terjerumus kepada perzinahan apabila tidak menikah.
- Nikah bisa sunat bagi orang yang sudah mampu dan nafsunya pun sudah mendesak akan tetapi masih bisa ia tahan (tidak dikhawatirkan terjerumus kepada perzinahan).
- Nikah bisa haram bagi orang yang tidak mampu memenuhi nafkah batin dan lahirnya serta nafsunya tidak mendesak atau pernikahan yang dilaksanakan dengan niat menganiaya sang wanita

⁵ Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran al-Qur'an, 1997), cet. Ke-9. h. 115.

⁶ Kaidah ushul mengatakan bahwa pada dasarnya amar itu menunjukkan hal yang wajib. Lihat

⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, h. 1330.

- Nikah bisa Makruh apabila calon suami merasa bahwa ia akan berbuat zalim kepada isterinya apabila ia menikahinya, baik karena lemah syahwat atau tidak mampu memberikan uang belanja yang cukup.
- Nikah bisa Mubah,⁸ yaitu bagi laki-laki yang tidak khawatir untuk terjerumus kepada perzinahan juga tidak berniat zalim terhadap isterinya.⁹

3. Rukun dan Syarat Nikah

Ulama fikih berbeda pendapat dalam menetapkan rukun nikah. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa rukun nikah hanya ada satu, yaitu Ijab dan Qabul. Sementara jumhur ulama berpendapat bahwa rukun nikah itu ada empat, yaitu *shighat* (*Ijab* dan *Qabul*), calon suami, calon isteri dan wali nikah. Sementara sebagian ulama menambahkan dua rukun yang lain, yaitu saksi dan mas kawin.¹⁰

Sedangkan rukun nikah yang terdapat dalam kompilasi hukum islam di Indonesia ada lima, yaitu :

- a. Calon Suami
- b. Calon isteri
- c. Wali nikah
- d. Dua orang saksi

⁸ Sebagian ulama berpendapat bahwa hukum asal nikah adalah mubah. Lihat Sulaiman Rasid, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), cet.ke-25, h. 381.

⁹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* (terj), (Bandung : PT al-Ma'arif, 1987), juz 6, cet.ke-4, h. 22-24.

¹⁰ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 36-37.

e. Ijab dan Qabul.¹¹

Masing-masing rukun nikah di atas mempunyai syarat-syarat tertentu. Calon suami disyaratkan bukan mahram dari perempuan yang akan dinikahinya, tidak beristeri lebih dari empat, tidak dipaksa (atas kemauan sendiri), bukan banci, mengetahui siapa calon isterinya, tidak sedang ihram, seorang muslim.¹²

Calon isteri disyaratkan bukan mahram bagi suaminya, tidak sedang dalam ikatan perkawinan atau tidak dalam masa iddah, tidak dipaksa, seorang muslimah yang terang bahwa ia seorang perempuan (bukan banci), tertentu orangnya dan bukan dalam keadaan ihram.

Wali nikah disyaratkan baligh, berakal, merdeka, laki-laki, Islam, tidak sedang ihram dan adil.¹³

Sementara saksi disyaratkan haruslah berakal, baligh, seorang muslim, laki-laki, berbilang (lebih dari satu) merdeka, adil, tidak tuli, tidak buta, tidak bisu, mengerti maksud ijab qabul, tidak pikun (*ghafil*), berakal baik dan tidak ditentukan menjadi wali.¹⁴

Sementara *shighat* (ijab dan qabul), disyaratkan keduanya harus terjadi dalam satu majlis, berkesinambungan antara ijab dan qabul, orang berijab tidak menarik ijabnya sebelum qabul diucapkan dan ijab dan qabul harus

¹¹ Departemen Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Islam, 1992), h. 18.

¹² Abd. Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta : Kencana, 2003), cet. Ke-1, h. 50.

¹³ Ahmad Rafiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998), h. 71.

¹⁴ *Ibid.*, h. 72.

selesai pada waktu itu juga (tidak boleh ijab hari ini sementara qabulnya besok pagi, atau mengatakan saya nikahkan engkau dengan anak saya besok pagi).¹⁵

4. Bentuk-bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam

Ada beberapa bentuk pernikahan yang dilarang dalam Islam, di antaranya adalah sebagai berikut :

a. Nikah Syighar

Nikah Syighar ialah nikah timbal balik. Misalnya, seseorang berkata :
 “Aku nikahkan anak perempuan aku dengan engkau dengan syarat engkau nikahkan pula anak perempuanmu denganku”. Pernikahan yang semacam ini tidak syah karena maskawinnya tidak ada, sedangkan maskawin adalah hak mutlak bagi seorang perempuan. Dalam nikah shighar ini, maskawinnya adalah perempuan yang dinikahi itu.¹⁶ Hadis Rasulullah SAW :

عن ابن عمر رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار فى العقد و الشغار أن يزوج الرجل ابنته على أن يزوجه ابنته و ليس بينهما صداق (رواه البخارى و مسلم)

Artinya : “Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW telah melarang *Syighar* dalam berakad, dan yang dimaksud dengan *Syighar* adalah menikahkan seorang anak perempuan dengan perjanjian dinikahnya pula anak perempuan dari laki-laki yang menikahi anaknya, dan tidak ada maskawin di antara keduanya. (HR. Bukhari dan Muslim)”.¹⁷

¹⁵ Wahbah Zuhaili, *Op.Cit.*, h. 49-52.

¹⁶ H. Ibnu Mas’ud, H. Zainal Abidin, S, *Op.cit*, h. 300.

¹⁷ Muhammad ibn Isma’il Abu Abdullah al-Bukhari al-Ju’fi, *Shahih al-bukhari*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5, h. 1966.

Berdasarkan hadis di atas, Jumhur ulama berpendapat bahwa pada dasarnya nikah syighar tidak diakui, oleh karena itu hukum nikah syighar adalah batal. Tetapi Abu Hanifah berpendapat bahwa nikah syighar itu sah, hanya saja bagi tiap-tiap perempuan yang bersangkutan wajib mendapatkan mahar yang sepadan dari masing-masing suaminya, karena kedua laki-laki yang menjadikan anaknya sebagai objek pertukaran tidaklah tepat, sebab wanita bukanlah barang yang dapat dipertukarkan sesama mereka. Dalam nikah ini yang batal adalah segi maharnya, bukan pada akad nikahnya sebagaimana kalau suatu perkawinan dengan memberikan persyaratan memberi minum khamar atau memakan babi, maka akad nikahnya di sini tidak batal, dan bagi perempuannya berhak atas mahar mitsil.¹⁸

Sebab Larangan Nikah Syighar

Para ulama berbeda pendapat tentang sebab atau `ilat dilarangnya nikah syighar. Sebagian ulama berpendapat nikah syighar dilarang karena sifatnya yang masih menggantung. Umpamanya dikatakan begini : “Tidaklah saudara dapat menjadi suami anakku sebelum anak saudara menjadi anak saya”. Tetapi ada pula yang berpendapat bahwa sebabnya itu karena menjadikan kelamin sebagai hak bersama, di mana kelamin masing-masing pihak dijadikan sebagai pembayaran mahar yang satu kepada yang lainnya. Hal ini berarti menzalimi kedua perempuan tersebut

¹⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 85-86.

dan merampas hak mahar dari perkawinannya. Menurut Ibnu Qayyim, pendapat ini sesuai dengan asal arti kata syighar itu sendiri.¹⁹

b. Nikah Mut'ah

Nikah Mut'ah adalah nikah yang tujuannya semata-mata untuk melepaskan hawa nafsu belaka, untuk bersenang-senang dan diadakan untuk waktu yang tertentu saja.²⁰

Empat imam mazhab sepakat mengatakan bahwa nikah mut'ah adalah batal, di mana dalam pernikahan ini seorang laki-laki menikahi seorang perempuan selama batas waktu tertentu. Umpamanya, seseorang mengatakan : “Saya nikahi kamu selama satu bulan atau dua bulan, dan sejenisnya”.²¹

Nikah Mut'ah pernah dihalalkan oleh Rasulullah SAW pada zamannya, tetapi kemudian beliau mengharamkannya untuk selamanya sampai hari kiamat. Dalam salah satu hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Muhammad ibn Abdullah ibn Numair, Rasulullah SAW bersabda :

يا ايها الناس انى قد كنت اذنت لكم فى الاستمتاع من النساء و ان الله قد حرم ذلك الى يوم القيامة فمن كان عنده منهن شىء فليخل سبيله ولا فأخذوا مما أتيتموهن شيئاً (رواه مسلم)

Artinya : “Wahai sekalian manusia, sesungguhnya aku telah mengizinkanmu beristimta` (melakukan nikah mut'ah) dengan wanita. Dan sesungguhnya Allah telah

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ Kamal Muchtar, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974), h. 111.

²¹ Muhammad ibn Abdurrahman al-Damasyqi, *Fiqh Empat Mazhab*, (terj.), (Bandung : Hasyimi Press, 2004), h. 351.

mengharamkan yang demikian itu sampai hari kiamat, maka barang siapa yang di sisinya ada kepunyaan mereka (perempuan), maka lalauilah jalannya dan janganlah kamu mengambil sesuatu yang kamu berikan kepada mereka sedikitpun”. (HR. Muslim).”²²

Sebab diharamkannya dinakah Mut’ah antara lain adalah sebagai berikut : (1) pernikahan seperti ini tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan di dalam al-Qur’an, dan juga tidak sesuai dengan masalah thalak, rujuk, iddah dan pusaka. Jadi, perkawinan semacam ini batil, sebagaimana bentuk-bentuk perkawinan lain yang dibatalkan oleh Islam. (2) Banyak hadis-hadis yang dengan tegas menyebutkan keharamannya. (3) Umar ibn Khattab Sewaktu menjadi khalifah dan berpidato di atas mimbar, ia mengharamkannya dan disetujui oleh para sahabat, padahal para sahabat tidak pernah mau menyetujui sesuatu yang salah. Andai kata nikah mut’ah tidak diharamkan agama, tentu para sahabat tidak menyetujuinya. (4) al-Kattabi mengatakan bahwa haramnya nikah mut’ah itu sudah menjadi ijma` di kalangan ulama, kecuali oleh beberapa golongan aliran syi’ah. (5) Nikah Mut’ah bertujuan hanya sekedar melampiaskan syahwat, bukan untuk mendapatkan anak dan memelihara anak-anak, padahal keduanya merupakan maksud pokok dari perkawinan.²³

c. Nikah yang kurang salah satu syarat atau rukunnya

²² Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shoheh Muslim*, (Dar Ihya At-Tirats Al-Arabi, tt), Juz 2, h. 1025.

²³ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 63.

Apabila suatu pernikahan dilaksanakan dalam keadaan kurang salah satu syarat-syarat atau rukun yang telah ditetapkan syara`, maka nikah itu dinyatakan batal dan dianggap tidak pernah terjadi.²⁴

d. Nikah Tahlil

Nikah tahlil adalah nikah untuk menghalalkan istri yang telah ditalak tiga. Dalam Islam talak hanya dibatasi sebanyak tiga kali. Apabila seorang suami telah mentalak isterinya sebanyak tiga kali, maka ia tidak boleh untuk rujuk kepada isterinya tersebut kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan. Dalam surat al-Baqarah ayat 229 Allah berfirman :



Talak (yang dapat dirujuki) dua kali. setelah itu boleh rujuk lagi dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik


Dalam surat al-Baqarah ayat 229 di atas Allah menjelaskan bahwa thalaq secara syar'i yang boleh dirujuk itu hanya dua kali. Apabila telah terjadi dua kali talaq dari seorang suami terhadap isterinya dan kemudian rujuk lagi, maka bagi suami hanya ada dua kemungkinan, yaitu menahan isterinya dengan baik, atau mentalaknya (melepaskannya) dengan niat yang baik pula.²⁵ Menahannya dengan baik bermakna mempergauli isteri dengan baik dan dengan cara layak dan sudah dikenal. Melepaskannya dengan baik berarti menceraikannya dan menunaikan hak-hak yang pantas

²⁴ Kamal Muchtar, *Op.Cit.*, h. 116.

²⁵ Ahmad Mushtafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi*, (terj), (Semarang : Toha Putra, 1993), juz 2, h. 293.

diterima isteri sebagai konsekuensi dari perceraian. Ayat ini oleh ulama dijadikan sebagai dalil dalam bilangan talak. Karena dalam ayat tersebut dikatakan bahwa talak itu hanya dua kali, setelah itu ia boleh untuk rujuk kedua kalinya dari talaknya yang kedua, atau kembali menjatuhkan talak untuk yang ketiga kalinya. Berdasarkan hal itu, maka talak dalam Islam hanya ada tiga kali untuk pasangan suami isteri dan hal ini berlaku umum untuk semua pasangan suami isteri yang merdeka.²⁶

Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Daruqutni diriwayatkan bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah : “wahai Rasul, Dalam al-Qur’an Allah berfirman *al-Thalaq Marratani* (talak itu dua kali), lantas kenapa dia menjadi tiga?”

Rasul menjawab
 “ Di sisi lain, kata

tasrih mempunyai makna yang sama dengan talak. Jadi *tasrih bi ihsan* sendiri bermakna talak ketiga. Rasulullah SAW bersabda :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال لعن رسول الله المحلل و
 المحلل له (رواه احمد و النشاء و الترمذى و صححه)

²⁶ Untuk pasangan suami isteri yang salah satu atau keduanya budak, maka talaknya hanya dua kali.

²⁷ Muhammad ibn Ahmad al-Qurthubi, *al-Jami’ Li Ahkam al-Qur’an*, (Beirut : Mu’assasah Risalah, 2006), juz 4. h. 57.

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata : Rasulullah SAW mengutuk Muhallil dan Muhallal Lah”. (HR. Ahmad, Nasa’I dan Turmudzi. Hadis ini saheh menurut Turmudzi).²⁸

Hadis di atas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW mengutuk dan mencela *Muhallil*, yaitu laki-laki yang menjadi suami kedua yang menikahi seorang perempuan dengan maksud perempuan tersebut kembali halal bagi suaminya pertama yang telah mentalaknya tiga kali talak, dan juga mengutuk *Muhallal Lah*, yaitu suami pertama yang ingin kembali kepada isterinya yang telah ditalak tiga.

Pernikahan yang seperti ini biasanya dilakukan untuk semalam atau dua malam saja. Hukumnya adalah batal. Hal ini dikarenakan maksud pernikahan adalah untuk mencari keturunan dan pusaka mempusakai bila salah seorang dari keduanya meninggal dunia. Oleh sebab itu, bila pernikahan itu hanya untuk semalam atau dua malam saja, tentu niat untuk mencari keturunan itu tidak dapat tercapai karena tujuannya hanya untuk menghalalkan suami yang pertama saja. Rasulullah SAW bersabda :

عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أَلَا أَخْبَرُكُمْ بِالتَّيْسِ الْمُسْتَعَارِ؟ قَالُوا: بَلَى، وَهُوَ الْمُحَلَّلُ، لَعَنَ اللَّهُ الْمُحَلَّلَ وَالْمُحَلَّلَ لَهُ (رواه ابن ماجه والحاكم)

Artinya : “Dari Uqbah ibn Amir RA ia berkata : “Rasulullah SAW bersabda : “maukah aku ceritakan kepadamu tentang kehormatan yang dipinjamkan? Mereka menjawab : “mau”.

²⁸ Muhammad ibn Isya al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), Juz 3, h. 427.

Dan itulah si Muhallil, Allah mengutuk Muhallil dan Muhallal Lah". (HR. Ibnu Majah dan Hakim).²⁹

Di dalam Ensiklopedi Hukum Islam dijelaskan, Nikah Tahlil adalah nikah yang dilakukan seorang laki-laki dan seorang perempuan yang telah diceraikan oleh suaminya dengan talak tiga dengan niat agar wanita tersebut kembali halal (boleh) melakukan perkawinan dengan bekas suaminya yang pertama setelah habis masa `iddahnya dari suaminya yang kedua. Adanya niat suami yang kedua untuk menghalalkan perkawinan antara suami yang pertama dengan bekas isterinya, itulah yang menjadikan perkawinan itu disebut dengan tahlil (secara kebahasaan berarti menghalalkan). Di dalam masyarakat Islam Indonesia nikah tahlil biasa disebut dengan Kawin Cina Buta (istilah hukum perdata/positif untuk nikah tahlil).³⁰

Dalam literatur fikih, suami pertama disebut *Muhallal Lah* (yang dihalalkan baginya untuk kembali menikahi bekas isterinya), sedangkan suami kedua disebut *Muhallil* (yang menghalalkan atau yang menyebabkan pernikahan antara suami pertama dengan bekas isterinya kembali halal).³¹ Hukum nikah tahlil adalah termasuk dosa besar dan mungkar karena diharamkan oleh Allah dan pelakunya diancam mendapat laknat.³²

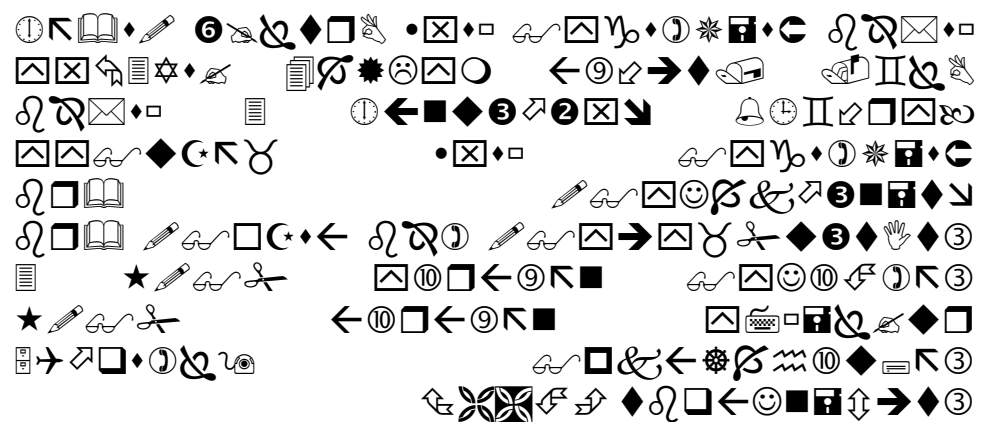
²⁹ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), juz 1, h. 623.

³⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit.*, h. 1347.

³¹ *Ibid.*

Kata laknat dalam hadis di atas,³³ memberikan pengertian bahwa perbuatan tersebut adalah suatu perbuatan yang dilarang dan berdosa. Dan setiap sesuatu yang dilarang, maka hukumnya haram untuk dilakukan.

Dalam surat al-Baqarah ayat 230 dijelaskan adanya larangan untuk menikahi bekas isteri yang telah ditalak tiga. Ayat tersebut berbunyi sebagai berikut :



Artinya : “Kemudian jika si suami mentalaknya (sesudah Talak yang kedua), Maka perempuan itu tidak lagi halal baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Kemudian jika suami yang lain itu menceraikannya, Maka tidak ada dosa bagi keduanya (bekas suami pertama dan isteri) untuk kawin kembali jika keduanya berpendapat akan dapat menjalankan hukum-hukum Allah. Itulah hukum-hukum Allah, diterangkan-Nya kepada kaum yang (mau) Mengetahui”.

Dalam ayat di atas, dijelaskan bahwa ketika seorang suami mentalak isterinya dengan talak tiga, maka perempuan (bekas isterinya) tersebut tidak halal lagi untuk hidup sebagai pasangan suami isteri dengan bekas suami yang telah mentalaknya. Namun jika perempuan tersebut telah menikah dengan laki-laki lain secara sah tanpa ada kepentingan yang

³² KH. Miftah Faridl, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999), h. 56.

³³ Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dari Uqbah ibn Amir.

mengikat satu sama lain, kemudian pada suatu waktu terjadi perceraian, baik perceraian dengan jalan talak ataupun perceraian karena suaminya yang kedua meninggal dunia, yang kemudian perempuan tersebut menjalani masa `iddahnya, dan setelah `iddah perempuan tersebut habis, maka suaminya yang pertama (yang pernah mentalaknya dengan talak tiga) boleh kembali kepada perempuan tersebut dengan akad nikah yang baru, dengan mahar yang baru dan dengan jumlah (bilangan) talak yang baru pula.

Suami yang telah mentalaknya tiga kali itu sering ingin kembali lagi kepada bekas isterinya.³⁴ Kalau ditunggu cara yang telah digariskan dalam aturan perkawinan, mungkin akan memakan waktu yang lama dan peluang untuk hal itu sangatlah kecil. Untuk membuka kembali peluang tersebut serta mempercepat maksudnya itu, maka ia mencari seorang laki-laki yang akan mengawini bekas isterinya itu secara pura-pura, biasanya dengan suatu syarat bahwa setelah berlangsungnya akad nikah segera diceraikannya sebelum sempat digauli. Ini berarti kawin akal-akalan untuk mempercepat menghentikan sesuatu yang diharamkan.³⁵ Nikah tahlil ini tidak batal karena kurangnya rukun dan syarat, akan tetapi karena niat orang yang mengawini itu tidak ikhlas dan tidak sejalan dengan maksud perkawinan yang telah digariskan Islam, maka perkawinan ini dilarang

³⁴ Di Kecamatan Kuantan Mudik kejadian seperti ini sering dilukiskan dengan pepatah *Talak Jatuo Sayangpun Tibo*.

³⁵ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 104.

Nabi SAW dan pelakunya, baik laki-laki yang menyuruh kawin maupun laki-laki yang menjadi penghalal itu dilaknat oleh Rasulullah.

Bila seorang suami mentalak isterinya tiga kali, maka tidak halal baginya untuk rujuk lagi, sebelum perempuannya sehabis masa `iddahnya kawin dengan laki-laki lain secara benar dan tidak dengan niat tahlil. Apabila kawinnya dengan suami yang kedua ini sungguh-sungguh dan berkumpul secara benar sehingga keduanya dapat saling merasakan madu kecil (bersetubuh), kemudian bercerai atau ditinggal mati (cerai mati), maka perempuan itu halal dikawini kembali oleh suaminya yang pertama apabila `iddahnya telah habis dari suaminya yang kedua tersebut.³⁶ Syafi'I, Ahmad, Bukhari dan Muslim meriwayatkan dari Aisyah :

جَاءَتْ امْرَأَةً رِفَاعَةَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ:
 إِنِّي كُنْتُ عِنْدَ رِفَاعَةَ فَطَلَّقَنِي فَبَتَّ طَلَّاقِي فَتَزَوَّجَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ
 ابْنُ الزُّبَيْرِ وَمَا مَعَهُ إِلَّا مِثْلَ هُدْيَةِ الثَّوْبِ، فَتَبَتَّمُ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَقَالَ: أَتُرِيدِينَ أَنْ تَرْجِعِي إِلَى رِفَاعَةَ... لَا... حَتَّى
 تَزُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَزُوقَ عُسَيْلَتَكَ.

Artinya : “Istri Rifa`ah al-Qardh pernah datang kepada Rasulullah SAW lalu berkata : saya dulu pernah menjadi isteri Rifa`ah, kemudian saya ditalaknya, dan talaknya itu padaku sudah tiga kali. Lalu saya kawin dengan Abdurrahman ibn Zubair, tetapi sayangnya ia ibarat ujung kain (lemah syahwat). Lalu Nabi SAW pun tersenyum seraya bersabda : Apakah kamu mau kembali kepada Rifa`ah? Oh tidak boleh, sebelum kamu benar-benar merasakan madu kecilnya (Abdurrahman ibn Zubair) dan dia merasakan madu kecilmu”.³⁷

³⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 75.

³⁷ Muhammad bin Isya Abi Isya At-Turmudzi Al-Salmi, *Op.cit*, Juz 3, h.426.

Hadis di atas menjelaskan, bahwa seorang yang dinikahi oleh seorang laki-laki setelah ia ditalak oleh suaminya yang terdahulu dengan talak tiga, tidak halal baginya untuk kembali kepada suaminya yang terdahulu, sekalipun ia telah cerai dengan suaminya yang kedua dan habis masa `iddahnya, kecuali apabila keduanya (sang isteri dengan suaminya yang kedua) telah melakukan hubungan badan sebagaimana layaknya sepasang suami isteri. Melakukan hubungan badan atau bersetubuh dalam hadis di atas cukup dengan bertemunya kedua alat kelamin laki-laki dan perempuan yang bisa mewajibkan mandi janabat dan dapat dikenai hukuman (had) zina apabila dilakukan di luar nikah.³⁸

Pada dasarnya, ulama dari mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i dan Hanbali berpendapat bahwa hukum nikah tahlil adalah sah. Akan tetapi mereka berbeda pendapat dalam menilai niat suami yang kedua melakukan perkawinan dengan wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang terdahulu. Perbedaan pendapat ini kemudian melahirkan perbedaan pendapat tentang sah atau tidaknya perkawinan kembali antara suami pertama dengan bekas isterinya.³⁹

Mazhab Hanafi dan Syafi'i, dengan persyaratan yang berbeda, menyatakan bahwa perkawinan kedua itu sah, meskipun niatnya untuk menghalalkan kembali perkawinan antara suami pertama dengan bekas isterinya tersebut. Sedangkan para ahli fikih Mazhab Maliki dan Hanbali

³⁸ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 68.

³⁹ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit.*, h. 1347.

berpendapat bahwa jika perkawinan itu dilakukan oleh suami kedua tanpa niat tahlil.

Mengenai laki-laki yang menjadi Muhallil (penyelang), Imamiyah dan Malik mensyaratkan bahwa, laki-laki yang menjadi Muhallil itu harus baligh, sedangkan syafi'i dan Hanafi memandang cukup bila dia (Muhallil) mampu melakukan hubungan seksual, sekalipun dia belum baligh⁴⁰.

5. Tujuan Islam dalam Pernikahan

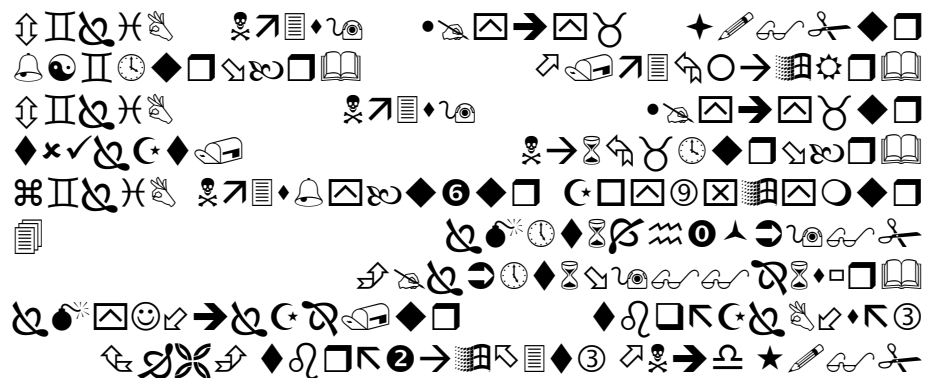
- a. Naluri sex merupakan naluri yang paling kuat dan keras yang selamanya menuntut adanya jalan keluar. Bilamana jalan keluar tidak dapat memuaskannya, maka banyaklah manusia yang mengalami kegoncangan dan kekacauan serta menerobos jalan yang jahat. Dan kawin adalah jalan alami dan biologis yang paling baik dan sesuai untuk menyalurkan dan memuaskan naluri sex ini.⁴¹ Dari sisi agama, sebagaimana diungkapkan oleh Rasulullah SAW dalam salah satu hadisnya, perkawinan bisa menundukkan pandangan, menjaga kehormatan dirinya dan dapat menyalurkan nafsu birahinya kepada yang halal.⁴²

⁴⁰ Muhamad Jawad Mughniyah, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera, 2005), Cet ke-3, h. 453.

⁴¹ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 19

⁴² Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (terj), ((Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 273.

- b. Dengan pernikahan terjadilah sebuah keturunan (anak cucu) yang mulia, yang dapat melestarikan eksistensi jenis manusia. Maka akan panjanglah umurnya dan akan berkesinambungan amalnya dengan adanya anak keturunan yang saleh setelahnya.⁴³ Allah berfirman dalam surat al-Nahl ayat 72 :



Artinya : “Allah menjadikan bagi kamu isteri-isteri dari jenis kamu sendiri dan menjadikan bagimu dari isteri-isteri kamu itu, anak-anak dan cucu-cucu, dan memberimu rezki dari yang baik-baik. Maka mengapakah mereka beriman kepada yang bathil dan mengingkari nikmat Allah ?”

- c. Naluri kebakakan dan keibuan akan tumbuh saling melengkapi dalam suasana hidup dengan anak-anak dan akan tumbuh pula perasaan-perasaan ramah, cinta dan sayang yang merupakan sifat-sifat baik yang menyempurnakan kemanusiaan seseorang. Dari sini akan terwujud rumah tangga yang tangguh yang merupakan benih masyarakat dan fondasi sebuah bangunan peradaban.
- d. Dengan adanya perkawinan akan ada pembagian tugas yang jelas antara seorang isteri (ibu) dengan seorang suami (bapak) serta menjadi motivasi bagi mereka untuk lebih tekun menjalankan tugas masing-

⁴³ *Ibid.*

masing. Dengan dorongan tanggung jawab, seorang ibu akan cekatan dalam memelihara dan mendidik anaknya, semengntara seorang ayah dapat serius menekuni pekerjaannya di luar rumah, dengan perasaan tentram bahwa di rumahnya ada orang yang mengatur urusannya, menjaga hartanya dan memelihara anak-anaknya.

- e. Dengan perkawinan hubungan social akan tumbuh berkembang, maka seseorang akan menggabungkan satu keluarga besar lain dengan keluarga besarnya, yaitu mertua, ipar dan lain sebagainya. Dengan demikian semakin luaslah ruang lingkup pertalian batin dan kasih sayang serta ikatan sosial.⁴⁴

B. Thalak

1. Pengertian Talak

Thalaq (Talak) menurut bahasa adalah *al-Takhaliyah* yang berarti melepaskan atau pelepasan.⁴⁵ Sedangkan menurut istilah fikih, para ulama fikih memberikan redaksi yang berbeda dalam mendefenisikannya.

Ada tiga defenisi yang dikemukakan oleh para ulama fikih. Defenisi pertama dikemukakan oleh ulama Mazhab Hanafi dan Mazhab Hanbali. Menurut mereka talak adalah pelepasan ikatan pernikahan secara langsung atau untuk masa yang akan datang dengan lafal tertentu.

⁴⁴*Ibid*, h. 273-277 dan Sayyid Sabiq 6, h. 19-21.

⁴⁵ Saleh al-Fauzan, *Fiqih Sehari-hari*, (terj), (Jakarta : Gema Insani Press, 2005), h. 698.

Defenisi kedua dikemukakan oleh ulama Mazhab Syafi'i. menurut mereka, talak adalah pelepasan akad nikah dengan lafal talak atau yang semakna dengan itu.

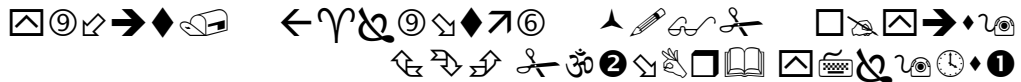
Defenisi ketiga dikemukakan oleh ulama Mazhab Maliki. Menurut mereka, talak adalah suatu sifat hukum yang menyebabkan gugurnya hubungan suami isteri.

Perbedaan ketiga defenisi di atas terlihat dalam kasus seorang suami yang menjatuhkan talak raj'i kepada isterinya. Menurut ulama Mazhab Hanafi dan Hanbali, perceraian melalui talak raj'i ini belum menghapuskan seluruh akibat talak, kecuali apabila iddah wanita itu habis. Mereka berpendapat bahwa apabila dalam masa iddah suami menggauli isterinya, maka perbuatan itu boleh saja dan dianggap sebagai pertanda rujuknya suami. Ulama Mazhab Maliki mengatakan, perbuatan itu jika disertai niat untuk rujuk berarti rujuk. Akan tetapi Ulama Mazhab Syafi'I mengatakan bahwa suami tidak boleh menggauli isterinya yang sedang dalam masa iddah dan perbuatan itu bukanlah pertanda rujuk. Karena, menurut mereka, rujuk itu harus dilakukan dengan perkataan atau pernyataan dari suami secara jelas, bukan dengan perbuatan.⁴⁶

2. Hukum dan dasar hukum talak

Ada beberapa ayat al-Qur'an yang berbicara tentang talak. Antara lain surat al-Baqarah ayat 299 :

⁴⁶ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit.*, h. 1777.



Artinya : “Hai nabi, apabila kamu menceraikan Isteri-isterimu Maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) iddahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu iddah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah, Maka Sesungguhnya dia Telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru”.⁴⁸

Dari ayat-ayat di atas, para Ulama fikih berpendapat bahwa pada dasarnya talak tersebut hukumnya mubah (diperbolehkan). Akan tetapi ulama fikih memberikan rincian hukum talak dilihat dari kondisi rumah tangga yang menyebabkan talak itu terjadi.

Adakalanya talak itu hukumnya wajib apabila antara suami isteri senantiasa terjadi percekocokan dan ternyata setelah ditempuh jalan damai melalui dua orang hakam (juru damai dari masing-masing pihak) percekocokan tersebut tidak kunjung membaik. Dalam kondisi seperti ini suami wajib menjatuhkan talak. Termasuk talak yang wajib dijatuhkan, menurut Ibnu Taymiah, adalah talak terhadap isteri yang berzina.⁴⁹

Adakalanya talak itu hukumnya sunat, yaitu apabila isteri tidak mau patuh terhadap hukum-hukum Allah, baik dalam kaitannya sebagai hamba Allah, maupun sebagai seorang isteri.

Adakalanya hukum talak itu haram, yaitu apabila suami tahu bahwa isterinya akan melakukan zina apabila ia menjatuhkan talak kepada isterinya

⁴⁸ *Ibid.* h. 945.

⁴⁹ Saleh al-Fauzan, *Op.Cit.*, h. 699.

tersebut. Termasuk talak yang haram adalah apabila suami menjatuhkan talak kepada isterinya yang masih dalam keadaan haid, nifas atau suci tetapi belum dicampuri.

Adakalanya talak itu hukumnya makruh apabila talak itu dijatuhkan tanpa alasan sama sekali. Hal ini dipahami dari hadis Nabi Muhammad SAW :

ابغض الحلال الى الله الطلاق

Artinya : “Sesuatu yang halal yang paling dibenci oleh Allah adalah talak” (HR. Abu Dawud dan Ibnu Majah).

Dan adakalanya talak itu hukumnya mubah, apabila talak itu dijatuhkan karena alasan tertentu, seperti akhlak wanita yang diceraikan tidak baik dan lain sebagainya⁵⁰

3. Rukun dan syarat

Ulama Mazhab Hanafi mengatakan bahwa rukun talak itu hanya satu, yaitu lafal yang menunjukkan pengertian talak, selain itu, menurut ulama Mazhab Hanafi, termasuk ke dalam syarat talak. Akan tetapi, jumhur ulama (Ulama Mazhab Maliki, Syafi’I dan Hanbali) berpendapat bahwa rukun talak itu ada empat. Dan masing-masing rukun ini mempunyai syarat-syarat tertentu. Rukun tersebut adalah :

- a. Suami yang mentalak. Untuk suami yang menjatuhkan talak disyaratkan haruslah orang yang cakap bertindak hukum (baligh berakal). Dengan demikian, talak orang gila tidaklah sah.
- b. Kehendak menjatuhkan talak.

⁵⁰ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit.*, h. 1777.

- c. Objek talak, yaitu isteri. Orang yang ditalak disyaratkan adalah isteri dalam ikatan perkawinan yang sah.
- d. Adanya lafal talak. Lafal talak disyaratkan mengandung makna melepaskan ikatan pernikahan dan pemutusan hubungan suami isteri. Baik dalam Bahasa Arab maupun dalam Bahasa Indonesia.⁵¹

4. Macam-macam Talak

a. Dari Segi Cara Menjatuhkan Talak

Dipandang dari cara menjatuhkan talak, talak bisa dibagi dua, yaitu talak sunni dan talak bid'i. talak sunni adalah talak yang dijatuhkan sesuai dengan tuntunan syari'at. Tata cara talak yang sesuai dengan tuntunan syari'at bisa dipahami dari surat al-Baqarah ayat 229 dan surat al-Thalaq ayat 1 di atas. Di samping itu, dalam sebuah hadis tentang kasus talak yang dilakukan oleh Abdullah ibn Umar ketika isterinya sedang haid, Rasulullah SAW bersabda :

مره فليراجعها ثم ليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم ان
شاءامسك بعد ذلك وان شاء طلق قبل ان يمس

Artinya : “Suruh dia kembali kepada isterinya dan bertahan sampai ia suci, kemudian haid, lalu suci lagi, setelah itu, jika ia ingin ia boleh bertahan dengan isterinya dan jika ia ingin ia boleh menceraikan isterinya sebelum ia gauli” (HR. Muslim, Abu Dawud, Ibnu Majah dan al-Nasa’i).⁵²

Dari nash-nash di atas, dapat dipahami, bahwa kriteria talak sunni adalah : (1) menjatuhkan talak harus secara bertahap (dimulai dengan talak satu, dua lalu tiga) dan harus diselingi dengan rujuk, (2) isteri tersebut dalam

⁵¹ *Ibid*, h. 1779.

⁵² Sayyid Sabiq , *Op.Cit.*, h. 43

keadaan suci dan belum digauli, dan (3) isteri tersebut telah nyata-nyata dalam keadaan hamil.

Adapun talak bid'i adalah talak yang dijatuhkan tidak sesuai dengan tuntunan syari'at. Seperti (1) talak yang dijatuhkan di saat isteri sedang haid, (2) talak yang dijatuhkan di saat isteri dalam keadaan nifas, (3) talak yang dijatuhkan tiga kali sekaligus,⁵³ dan (4) talak yang dijatuhkan kepada isteri yang telah digauli dan belum jelas apakah ia hamil atau tidak.

b. Dari Segi Boleh atau Tidaknya Suami untuk Rujuk

Dari segi boleh atau tidaknya suami untuk rujuk kembali kepada isterinya, talak dapat dibagi dua, yaitu talak raj'I dan talak Ba'in. sementara talak Ba'in sendiri terbagi kepada talak ba'in sughra dan talak ba'in kubra.

Talak Raj'I adalah talak dimana suami bisa kembali kepada isterinya dengan cara rujuk. Keriteria Talak raj'I adalah (1) Talak yang dijatuhkan terhadap isteri yang telah digauli, (2) merupakan talak pertama atau kedua, dan (3) bukan merupakan ganti dari mahar yang dikembalikan (bukan perceraian akibat khulu').⁵⁴ Dalam talak raj'I ini suami berhak kembali kepada isterinya tanpa akad nikah baru, selama isteri tersebut masih dalam masa iddah.

Talak ba'in sughra adalah talak raj'I yang habis masa iddahnya, talak yang dijatuhi terhadap isteri yang belum pernah digauli, dan talak yang dijatuhi dengan tebusan (khulu'). Dalam talak seperti ini, suami tidak boleh

⁵³ Dalam literatur fikih talak seperti ini disebut *Thalaq Battah*. Para sahabat sendiri berbeda pendapat dalam menilai bilangan talak ini, Umar ibn Khattab menghitung talak ini jatuh satu, sedangkan Ali ibn Abi Thalib menghitungnya jatuh tiga. Lihat Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, juz 8, h. 58.

⁵⁴ *Ibid*

kembali begitu saja kepada isterinya, akan tetapi harus dengan nikah dan mahar yang baru.

Talak Ba'in Kubra adalah talak yang dijatuhkan untuk ketiga kalinya. Dalam keadaan seperti ini, suami tidak boleh rujuk (kembali) lagi kepada bekas isterinya, sampai isterinya tersebut kawin lagi dengan laki-laki lain dan telah bergaul dengan suaminya itu dalam arti yang sesungguhnya. Kemudian ia bercerai dengan suaminya itu, baik cerai talak maupun karena suaminya meninggal dunia. Apabila telah habis masa iddahanya, barulah suami pertama boleh menikah kembali dengannya dengan mahar yang baru.

Apabila suami kembali kepada isteri yang telah ditalak itu dengan akad nikah dan mahar baru, maka ia kembali memiliki hak talak sebanyak tiga kali karena perkawinannya yang kedua dianggap sebagai perkawinan baru. Berbeda halnya dengan talak Ba'in Sughra. Meskipun suami kembali kepada isterinya dengan akad nikah dan mahar yang baru, namun bilangan talak yang dimiliki suami telah berkurang. Artinya, apabila talak Ba'in Sughra terjadi pada talak satu, berarti suami hanya memiliki hak talak dua lagi, dan seterusnya. Akan tetapi apabila wanita yang telah ditalak Ba'in Sughra telah menikah lagi dengan laki-laki lain, kemudian cerai dan menikah lagi dengan suaminya yang pertama, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Abu Yusuf, suaminya kembali mendapatkan hak tiga kali talak. Sementara Imam al-Syaibani mengatakan bahwa suami tersebut hanya memiliki sisa talak

sebagaimana disebutkan di atas. Dan masalah ini dalam istilah fikih disebut al-Hadm (penghapusan hitungan talak).⁵⁵

C. Nikah Dan Talak Dalam Hukum Positif

Perkawinan dalam perundang-undangan Indonesia diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 9 tahun 1975, dan untuk lingkup terbatas, ada beberapa peraturan seperti PP No. 10 tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil,⁵⁶ Keputusan Menteri Pertahanan Keamanan/Panglima Angkatan Bersenjata Tanggal 3 Januari 1980 No. Kep/01/I/1980 tentang Peraturan Perkawinan, Perceraian dan Rujuk Anggota ABRI,⁵⁷ Petunjuk Teknis Kepala Kepolisian Republik Indonesia Tanggal 31 Maret 1981 No. POL. JUKNIS/01/III/1981 tentang Perkawinan Perceraian dan Rujuk Bagi Anggota POLRI,⁵⁸ Peraturan Jaksa Agung tanggal 19 Mei 1982 No. PER./001/JA/5/1982 Tentang Perkawinan dan Perceraian Karyawan Kejaksaan Republik Indonesia.⁵⁹ Sebelum lahirnya Undang-undang tersebut, di Indonesia, di samping peraturan tidak tertulis seperti hukum adat dan hukum fikih Islam, sudah ada beberapa peraturan tentang perkawinan, seperti :

⁵⁵ Abdul Aziz Dahlan, *Op.Cit.*, h. 1785. Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, juz 8, h. 69.

⁵⁶ Dirjen Bimas Islam Depag RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2008), h. 72-73.

⁵⁷ Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet. Ke-5, h. 61-81.

⁵⁸ *Ibid*, h. 81-101.

⁵⁹ *Ibid*, h.101-127.

- Peraturan Perkawinan Campuran (Regeling op de Gemengde Huwelijken), stbld. 1898 No. 158,
- Ordonansi Perkawinan Indonesia-Kristen Jawa, Minahasa dan Ambon (Huwelijken Ordonantie, voor Christen Indonesiers Jawa, Minahasaen Amboina), stbld. 1933 No. 74 jo 36-607 jo L.N. 1946 No. 136.
- Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek),
- Undang-undang No. 32 tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk (L.N. No. 1954 No. 98).⁶⁰

1. Dasar dan Syarat Perkawinan

Dasar dan syarat perkawinan diatur dalam Bab I dan Bab II (Pasal 1 s/d pasal 12) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. Bab-bab ini mengatur tentang arti dan tujuan perkawinan, sahnya perkawinan, pencatatan perkawinan, asas monogami, persetujuan, batas umur, larangan perkawinan, waktu tunggu dan tata cara perkawinan.

Arti Perkawinan

Perkawinan, sesuai dengan yang tertera dalam pasal 1, adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶¹

Ikatan lahir adalah ikatan yang dapat dilihat. Mengungkapkan adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup

⁶⁰ K. Wantjik Saleh, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997), h. 12.

⁶¹ Pasal 1 UU Perkawinan

bersama sebagai suami isteri, dengan kata lain hubungan lahir dapat disebut “hubungan formil”. Hubungan formil ini nyata, baik bagi yang mengikatkan dirinya maupun bagi masyarakat. Sedangkan ikatan batin adalah hubungan yang tidak formil, suatu ikatan yang tidak dapat dilihat. Walau tidak nyata, tapi ikatan itu harus ada. Karena tanpa adanya ikatan batin, ikatan lahir akan menjadi rapuh.

Sahnya Perkawinan

Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.⁶² Dengan demikian, Hazairin menyatakan, sebagaimana dikutip oleh Wantjik Saleh, tidak ada kemungkinan bagi orang Islam untuk kawin dengan melanggar hukum agamanya sendiri. Demikian juga bagi orang Kristen, Hindu atau Hindu Budha seperti yang terdapat di Indonesia.⁶³

Sebagai salah satu perbuatan hukum, maka perkawinan mempunyai akibat hukum. Adanya akibat hukum ini penting sekali hubungannya dengan sahnya perbuatan hukum itu. Suatu perkawinan yang menurut hukum tidak sah umpamanya, maka anak yang lahir dari perkawinan itu akan merupakan anak yang tidak sah.

Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan tidak menjelaskan tentang maksud diadakannya pencatatan itu. Dalam penjelasan umum hanya dikatakan bahwa tiap-tiap peristiwa perkawinan sama

⁶² Pasal 2 ayat 1,

⁶³ K. Wantjik Saleh, *Op.Cit.*, h. 15-16.

halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan.

Perbuatan pencatatan tidak menentukan sahnyanya perkawinan, tetapi menyatakan bahwa peristiwa perkawinan itu memang ada dan terjadi, jadi semata-mata hanya bersifat administratif. Untuk melaksanakan pencatatan, bagi yang beragama Islam dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk. Sedangkan bagi yang tidak beragama Islam dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil.⁶⁴

Asas Monogami

Sebelum undang-undang perkawinan diundangkan, asas monogami menjadi topik yang ramai diperbincangkan. Kenyataannya kemudian monogami menjadi salah satu asas tapi dengan suatu pengecualian yang ditujukan kepada orang yang menurut hukum dan agamanya mengizinkan seorang suami boleh beristeri lebih dari seorang.

Adapun alasan yang dapat memungkinkan seorang suami untuk beristeri lebih dari seorang adalah salah satu hal sebagai berikut :

- Isteri tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai isteri,
- Isteri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan,
- Isteri tidak dapat melahirkan keturunan.

Salah satu alasan di atas, dalam pengajuannya kepada Pengadilan harus didukung oleh ketiga syarat sebagai berikut :

⁶⁴ *Ibid*

- Adanya persetujuan dari isteri/isteri-isteri,
- Adanya kepastian bahwa suami mampu menjamin keperluan-keperluan hidup isteri-isteri dan anak-anak mereka,
- Adanya jaminan bahwa suami akan berlaku adil terhadap isteri-isteri dan anak-anak mereka.⁶⁵

Persetujuan

Yang dimaksud dengan persetujuan di sini adalah persetujuan antara calon suami dan calon isteri, sebagaimana disebutkan dalam pasal 6 (1) Undang-Undang Perkawinan. Dan dasar harus adanya suatu persetujuan itu memang merupakan alasan yang kuat, karena dengan adanya persetujuan itu berarti telah dipasang suatu fondasi yang kokoh untuk membina suatu keluarga dan rumah tangga.⁶⁶

Batas Umur

Penentuan batas umur untuk melangsungkan perkawinan sangatlah penting sekali. Karena suatu perkawinan, di samping menghendaki kematangan biologis juga psikologis. Maka dalam penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa calon suami-isteri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan agar supaya dapat mewujudkan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada suatu perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus

⁶⁵ *Ibid.*, h. 22-25.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 25

dicegah adanya perkawinan antara calon suami-isteri yang masih di bawah umur.

Pasal 7 (1) Undang-Undang Perkawinan menetapkan pria harus sudah mencapai umur 19 tahun dan wanita harus sudah mencapai umur 16 tahun, baru diizinkan untuk melangsungkan perkawinan.⁶⁷

Larangan Perkawinan

Undang-Undang Perkawinan menentukan beberapa larangan untuk melangsungkan perkawinan yang dimuat dalam pasal 8, 9 dan 10, kiranya dapat digolongkan menjadi 7 macam larangan, yaitu :

- Karena adanya hubungan darah,
- Karena adanya hubungan semenda,
- Karena adanya hubungan susuan,
- Karena hubungan dalam perkawinan poligami,
- Karena larangan agama,
- Karena masih terikat dalam perkawinan,
- Karena bercerai kedua kali.⁶⁸

2. Pencegahan, Pembatalan dan Perjanjian Perkawinan

Arti Pencegahan dan Pembatalan

Undang-undang Perkawinan mengatur tentang pencegahan dan pembatalan perkawinan sebagaimana tercantum dalam pasal 13 s/d 20 dan pasal 22 s/d 28. Antara pencegahan dan pembatalan terdapat persamaan

⁶⁷ *Ibid.*, h. 256.

⁶⁸ *Ibid.*, h. 27

sebabnya, yaitu apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Yang menjadi perbedaan asasi antara pencegahan dan pembatalan adalah waktunya, yaitu pencegahan dilaksanakan sebelum berlangsungnya perkawinan sedangkan pembatalan dilaksanakan setelah terjadinya perkawinan.⁶⁹

Perjanjian Perkawinan

Pasal 29 Undang-Undang Perkawinan mengatur tentang perjanjian perkawinan. Menurut ketentuan tersebut, bahwa kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat nikah. Perjanjian tersebut dapat diadakan pada waktu atau sebelum dilangsungkan perkawinan, dengan syarat bahwa perjanjian itu tidak boleh melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan.⁷⁰

3. Perceraian

Dalam Undang-Undang Perkawinan dinyatakan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal dan sejahtera. Dengan pengertian bahwa untuk itu perlu dipersukar terjadinya perceraian. Dengan maksud tersebut, maka ditentukanlah bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagai suami isteri.

Adapun alasan yang dimaksud tercantum dalam penjelasan pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Perkawinan sebagai berikut :

⁶⁹ *Ibid.*, h. 29.

⁷⁰ *Ibid.*, h. 32

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan,
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya,
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung,
- Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain,
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/isteri,
- Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.⁷¹

Cara Perceraian

Dari ketentuan-ketentuan tentang perceraian dalam Undang-undang perkawinan (pasal 39 sampai dengan 41) dan tentang tatacara perceraian dalam peraturan pelaksanaan (pasal 14 sampai dengan 36) dapat ditarik kesimpulan adanya dua macam perceraian yaitu Cerai Talak dan Cerai Gugat.

⁷¹ *Ibid.*, h. 36-37.

a. Cerai Talak

Istilah “Cerai Talak” disebut oleh penjelasan pasal 14 peraturan pelaksanaan. Dan tentang perceraian ini diatur dalam pasal 14 sampai dengan pasal 18 peraturan pelaksanaan, yang merupakan penegasan dari pasal 39 Undang-undang perkawinan. Cerai talak ini hanya khusus untuk yang beragama islam seperti dirumuskan oleh pasal 14 peraturan pelaksanaan sebagai berikut:

“Seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut agama Islam, yang akan menceraikan istrinya, mengajukan surat kepada pengadilan ditempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya disertai dengan alasan-alasannya serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.”

Dari ketentuan diatas, dalam hubungan dengan pelaksanaannya, jelas bahwa pengajuan pemberitahuan itu harus dilakukan secara tertulis(surat). Perlu juga ditegaskan di sini, bahwa yang diajukan oleh suami tersebut bukanlah suatu “Surat Permohonan”, akan tetapi “Surat Pemberitahuan” yang memberitahukan bahwa ia akan menceraikan istrinya dan untuk itu ia meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk menyaksikan perceraian itu.

b. Cerai Gugat

Yang dimaksud dengan “Cerai Gugat” ini adalah perceraian yang disebabkan oleh adanya suatu gugatan terlebih dahulu oleh salah satu pihak kepada Pengadilan dan dengan suatu putusan Pengadilan. Undang-Undang Perkawinan dan Peraturan Pelaksanaannya tidak menamakan hal ini “Cerai Gugat”, tetapi menyatakan bahwa perceraian ini dengan suatu

gugatan, penamaan ini hanyalah istilah yang sudah lazim dikenal di masyarakat.

Cerai Gugat melalui tahapan-tahapan sebagai berikut :

- Pengajuan Gugatan

Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tergugat.

- Pemanggilan

Pemanggilan terhadap para pihak ataupun kuasanya, dilakukan setiap kali akan diadakan persidangan. Yang melakukan pemanggilan tersebut adalah juru sita di Pengadilan Negeri atau petugasyang ditunjuk di Pengadilan Agama.

- Persidangan

Persidangan untuk memeriksa gugatan perceraian harus dilakukan oleh Pengadilan selambat-lambatnya 30 hari setelah diterimanya surat gugatan di kepaniteraan.

- Perdamaian

Ditentukan bahwa sebelum dan selama perkara gugatan belum diputuskan, Pengadilan harus berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Apabila tercapai suatu perdamaian, maka tidak dapat diajukan gugatan perceraian baru berdasarkan alasan atau alasan-alasan yang ada sebelum perdamaian dan telah diketahui oleh penggugat pada waktu dicapainya perdamaian.

- Putusan

Walaupun pemeriksaan perkara gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup, tapi pengucapan putusannya harus dilakukan dalam sidang terbuka. Suatu putusan tidak hadir mungkin saja dijatuhkan, tetapi ketidakhadiran tergugat atau kuasanya itu, tidak dapat merupakan alasan untuk dikabulkannya gugatan perceraian apabila gugatan itu tidak berdasarkan pada alasan yang telah ditentukan.⁷²

⁷² *Ibid.*, h. 37-44.

BAB IV
PELAKSANAAN UPAH TALAK
DI KEC. KUANTAN MUDIK MENURUT HUKUM ISLAM
(Studi Perbandingan Antara Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai)

A. Pelaksanaan Upah Talak Di Desa Pangkalan dan Muara Petai

Perkawinan, sebagaimana telah disinggung sebelumnya, dimaksudkan untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sesuai dengan tuntunan Ilahi. Sebab keluarga yang diridhai Allah adalah sel pertama bagi berdirinya masyarakat yang bertaqwa dan akan melahirkan individu-individu yang saleh.¹ Akan tetapi, mimpi yang pernah terukir di awal pernikahan seringkali hancur di tengah jalan dan berujung pada perceraian. Perceraian, walaupun diperbolehkan, akan tetapi secara tersirat sesungguhnya tidak diinginkan oleh Islam. Makanya talak dalam aturan syari'at hanya dibatasi tiga kali dan haram bagi suami untuk kembali kepada isterinya, kecuali dengan syarat-syarat tertentu, apabila ia telah menceraikan isterinya sebanyak tiga kali.

Permasalahan kemudian muncul ketika keinginan untuk kembali kepada isteri muncul ketika talak tiga sudah dijatuhkan. Hal inilah yang oleh pameo adat dilukiskan dengan kata “*Talak jatuo sayang pun tibo*” (Rasa cinta kembali bersemi di saat kata cerai telah diucapkan). Akhirnya, berbagai usaha dilakukan untuk kembali bisa bersatu dengan isteri yang telah ditalak tiga. Di

¹ Yusuf Qardhawi, *Pengantar Kajian Islam*, (terj), ((Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1997), h. 269.

kecamatan Kuantan Mudik usaha untuk menghalalkan kembali isteri yang telah ditalak tiga lazim dikenal dengan istilah *Upah Talak*.

Penamaan *Upah Talak* itu sendiri sudah ada sejak lama. Secara harfiah (kebahasaan), pemahaman yang dapat ditangkap dari penamaan ini adalah seseorang mendapatkan upah atau bayaran atas perbuatannya menikahi seorang wanita lalu menceraikannya (mentalaknya).²

Beberapa kasus *Upah Talak* telah terjadi di kecamatan tersebut. Berikut penulis paparkan kasus *Upah Talak* di Desa Pangkalan sejak tahun 2000 melalui tabel di bawah ini :

TABEL VII
KASUS PERNIKAHAN UPAH TALAK DI DESA PANGKALAN
TAHUN 2000-2008

No	NAMA ISTERI	NAMA SUAMI PERTAMA	NAMA SUAMI KEDUA
1.	Mastuti	Rasid	Buyung
2.	Meri	Syamsur	Abai
3.	Saudah	Muttakin	Salamat
4.	Normanis	Ali Effendi	Tuliyah
5.	Siyah	Said	Irul

Dari tabel di atas dapat diketahui kasus *Upah Talak* yang terjadi di Desa Pangkalan. Kasus pertama terjadi pada tahun 2004, di mana Rasid (35 tahun) yang telah mentalak isterinya, Mastuti (32 tahun), sebanyak tiga kali

² Tarnizi (Pemuka Masyarakat Muara Petai), *Wawancara*, Desa Muara Petai, 27 Oktober 2008.

hendak kembali lagi kepada isterinya tersebut. Untuk memuluskan niatnya tersebut, Rasid meminta Buyung, seorang perantau dari Sumatra Barat yang menetap di Desa Timpe, untuk menikahi Mastuti. Untuk itu Buyung menerima bayaran sebanyak Rp. 40.000,-. Pernikahan antara Buyung dan Mastuti hanya berumur sehari semalam dan sekarang Rasid telah kembali hidup sebagai suami isteri dengan Mastuti.³

Kasus kedua adalah Syamsur (37 tahun) yang telah cerai talak tiga dengan isterinya Meri (30 tahun). Kejadian ini terjadi pada 2005, di mana Syamsur meminta Abai, warga Desa Ibul, untuk menikahi isterinya dan membayar Abai sebesar Rp. 250.000,-. Abai akhirnya menikahi Meri dan bercerai sehari setelah itu. Sekarang Syamsur dan Meri telah kembali kepada ikatan pernikahan mereka.⁴

Kasus ketiga terjadi pada tahun 2006, yaitu pasangan Muttakin (36 tahun) dan isterinya Saudah (35 tahun). Nama suami keduanya adalah Salamat, warga Desa Timpe, dan Salamat mendapatkan uang sebesar Rp. 300.000,- untuk pernikahan ini dan bercerai dengan Saudah sehari setelah akad nikah dilangsungkan.⁵

Kasus keempat juga terjadi pada tahun 2006, yaitu antara Ali Effendi (40 tahun) dengan isterinya Normanis (34 tahun). Dengan bayaran Rp.

³ Buyung, *Wawancara*, Desa Timpe, 3 November 2008

⁴ Abai, *Wawancara*, Desa Ibul, 5 November 2008.

⁵ Buyung, *Wawancara*, Desa Timpe, 3 November 2008

150.000,- Ali Effendi meminta Tuliyah, warga Desa Timpe, untuk menikahi Normasin dan bercerai dua hari setelah akad nikah.⁶

Kasus kelima terjadi antara Said (65 tahun) dan Siyah (50 tahun). Kejadian ini terjadi pada tahun 2007, di mana Irul, warga Desa Sungkai, menerima bayaran Rp. 350.000,- untuk menikahi Siyah dan bercerai sehari setelah itu.⁷

Tabel berikut ini merupakan data kasus *Upah Talak* yang terjadi di Desa Muara Petai sejak tahun 2000

TABEL VIII
KASUS PERNIKAHAN UPAH TALAK DI DESA PANGKALAN
TAHUN 2000-2008

No	NAMA ISTERI	NAMA SUAMI PERTAMA	NAMA SUAMI KEDUA
1.	Sinar	Sarinam	Suud
2.	Nurani	Surabai	Cuit
3.	Nawar	Nurdian	Romi
4.	Maimun	Aman	Pendi
5.	Robiah	Isap	Saipul

Dari tabel di atas dapat diketahui kasus upah talak yang terjadi di Desa Muara Petai. Kasus pertama terjadi pada 2003, di mana Sarinam (32 tahun) untuk ketiga kalinya mentalak isterinya Sinar (29 tahun). Karena ingin

⁶ *Ibid.*

⁷ Anuar (warga Desa Muara Petai), *Wawancara*, Desa Muara Petai, 23 November 2008.

kembali, ia membayar Suud, warga Desa Sungai Duo, sebanyak Rp. 30.000,- untuk menikahinya dan menceraikannya sehari setelah akad nikah.⁸

Kasus kedua terjadi pada tahun 2005. Surabaya (27 tahun) yang mentalak tiga Nurani (25 tahun) membayar Cuit sebanyak Rp. 150.000,- untuk menikahi Nurani dan bercerai sehari setelah akad nikah.

Kasus ketiga terjadi antara pasangan Nurdian (28 tahun) dan Nawar (25 tahun). Yang menjadi suami kedua dalam kasus ini adalah warga Desa Sungkai yang bernama Romi. Dia mendapatkan bayaran sebanyak Rp. 250.000,- dan bercerai sehari setelah akad nikah. Kasus ini terjadi pada tahun 2006.⁹

Kasus keempat terjadi pada pasangan Aman (30 tahun) dan Maimun (25 tahun). Yang menjadi suami kedua dalam kasus ini adalah warga Desa Sei Besar yang bernama Pendi. Pendi mendapatkan bayaran sebesar Rp. 200.000,- dan bercerai sehari setelah akad nikah. Kasus ini terjadi pada tahun 2006.

Kasus kelima terjadi pada tahun 2008. Yaitu pasangan Isap (30 tahun) dan Robiah. Yang menjadi suami keduanya adalah warga Desa Teluk Beringin yang bernama Saipul. Saipul mendapatkan bayaran sebesar Rp. 500.000,- dan bercerai dua hari setelah akad nikah.¹⁰

Secara umum, akad nikah yang dilakukan dalam pernikahan ini tidak berbeda dengan bentuk pernikahan yang lazim dilakukan oleh masyarakat,

⁸ Ijun (Sahabat Suud/warga Desa Sungai Duo), *Wawancara*, Desa Sungai Duo, 8 November 2008.

⁹ Yani (warga Desa Muara Petai), *Wawancara*, Desa Muara Petai, 17 November 2008.

¹⁰ Saipul, *Wawancara*, Desa Teluk Beringin, 15 November 2008.

sebab pernikahan ini telah memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan agama, seperti adanya wali, saksi, habisnya masa iddah pihak perempuan, dan syarat serta rukun nikah lainnya. Hanya saja yang hadir dalam akad nikah itu biasanya hanyalah keluarga terdekat saja dan tidak ada resepsi pernikahan (*Walimah al-Ursy*) dalam pernikahan ini.

Pemaparan di atas, menggambarkan bahwa tidak ada perbedaan antara pernikahan *Upah Talak* dengan pernikahan yang lazim dilaksanakan oleh pasangan lainnya. Hanya saja pelaksanaan pernikahan dengan istilah *Upah Talak* ini tidak tercatat secara resmi di Kantor Urusan Agama atau dengan kata lain pernikahan ini dilakukan dengan cara siri.¹¹

Pernikahan *Upah Talak* sudah dikenal dan sering terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik, akan tetapi kasus pernikahan *Upah Talak* yang paling banyak terjadi ditemukan di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai sebagai mana dipaparkan di atas. Walaupun dua desa ini merupakan dua desa yang berdekatan, akan tetapi ada perbedaan yang terjadi antara Pernikahan *Upah Talak* yang dilaksanakan oleh warga Desa Pangkalan dengan warga Desa Muara Petai. Di mana warga Desa Pangkalan melakukan pernikahan *Upah Talak* di luar desanya sementara warga Desa Muara Petai tetap melaksanakan praktek *Upah Talak* di desanya sendiri. Untuk mengetahui lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

¹¹ Dari nama-nama pasangan yang disebutkan di atas, tidak satupun pernikahannya yang secara resmi tercatat di Kantor Urusan Agama. (Sumber : Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuantan Mudik)

TABEL IX
LOKASI PELAKSANAAN PERNIKAHAN UPAH TALAK

No	Lokasi pelaksanaan	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Di Desa Bersangkutan	-	0 %	5	100 %
2.	Di Luar Desa Bersangkutan	5	100 %	-	0 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa semua pernikahan yang dilaksanakan oleh warga masyarakat Desa Pangkalan dilaksanakan di luar Desa pangkalan dan pada umumnya dilaksanakan di Desa Timpe. Sementara semua pernikahan Upah Talak yang dilaksanakan oleh warga Desa Muara petai dilaksanakan di Desa Muara Petai itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal. *Pertama*, di Desa Muara Petai ada Ustadz yang mau menikahkan orang yang hendak melaksanakan pernikahan Upah Talak, akan tetapi di Desa Pangkalan tidak ada ustadz yang mau melaksanakannya, *Kedua*, menurut hemat penulis hal ini juga disebabkan perbedaan pandangan atau persepsi masyarakat Desa Pangkalan dan Muara Petai dalam memandang pernikahan Upah Talak di mana akan penulis bahas lebih lanjut pada bagian berikutnya.

Dari data di atas diketahui bahwa terdapat perbedaan yang cukup signifikan anatar Desa pangkalan dengan Desa Muara Petai, akan tetapi apakah ada perbedaan yang terjadi dalam proses pelaksanaan nikah Upah

Talak pada kedua desa tersebut? Untuk menjawab hal tersebut dapat dilihat pada pembahasan di bawah ini.

Proses pernikahan (sebelum atau pada waktu akad nikah dilangsungkan) tersebut, tidak disebutkan bahwa pernikahan yang sedang ataupun yang akan dilaksanakan adalah pernikahan *Upah Talak*. Kedua mempelai pun tidak akan pernah mengakui bahwa mereka akan melaksanakan pernikahan *Upah Talak*. Indikasi bahwa pernikahan ini adalah pernikahan *Upah Talak* diketahui hanyalah melalui isu yang berkembang sebelumnya di tengah masyarakat, bahwa mantan suami sang wanita (suami yang pertama) hendak kembali rujuk dengan mantan istrinya. Selain itu, biasanya pernikahan *Upah Talak* baru diketahui setelah suami kedua menceraikan istrinya tak lama setelah akad nikah, dan pihak perempuan tersebut kembali kepada suaminya yang pertama setelah diceraikan lagi oleh suaminya yang kedua dan habis masa 'iddahnya.

Dari deskripsi kasus *Upah Talak* di atas, dapat diketahui bahwa semua pernikahan yang dilakukan di atas tidak berumur panjang. Pernikahan tersebut berakhir dengan perceraian dalam waktu yang sangat singkat dan umumnya perceraian tersebut tidak diawali oleh pertengkaran atau perselisihan. Untuk mengetahui usia perkawinan yang dilakukan dalam praktek upah talak ini, dapat dilihat pada table di bawah ini :

TABEL X
USIA PERKAWINAN UPAH TALAK

No	Lama Usia Perkawinan	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	0-1 Minggu	5	100 %	5	100 %
2.	1-4 Minggu (sebulan)	-	-	-	-
3.	Lebih sebulan	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa 100 % dari kasus Upah Talak, usia perkawinannya hanya berumur di bawah satu minggu, atau kalau lebih dirinci lagi, berdasarkan deskripsi di atas, empat dari lima kasus perkawinan upah talak di masing-masing desa tersebut di atas, atau 80 %, hanya berusia sehari semalam, dan hanya satu atau 20 % yang berusia lebih satu hari, yaitu dua hari.

Dari data di atas, ada indikasi bahwa pernikahan kedua ini memang tidak dimaksudkan untuk membina rumah tangga, akan tetapi hanya untuk menghalalkan suami pertama untuk kembali kepada mantan isterinya, dan tentunya hal ini sudah disepakati sebelumnya antara suami pertama dan suami kedua. Untuk mengetahui apakah ada kesepakatan antara suami pertama dan suami kedua sebelum dilaksanakannya pernikahan antara suami kedua dengan sang isteri, penulis mengajukan pertanyaan kepada suami kedua dan jawabannya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

TABEL XI
PENGAKUAN SUAMI KEDUA TENTANG KESEPAKATANNYA
DENGAN SUAMI PERTAMA

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Ya	5	100 %	5	100 %
2.	Tidak	-	-	-	-
3.	Menolak Menjawab	-	-	-	-

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa semua pernikahan upah talak yang terjadi di kedua desa tersebut, sebelumnya sudah terjadi kesepakatan antara suami pertama dan suami kedua. Data dari tabel ini diperkuat lagi dengan data yang penulis paparkan di atas, di mana suami kedua menerima imbalan berupa sejumlah uang dari suami pertama.

Menarik untuk diteliti lebih jauh, apakah isteri terlibat dalam kesepakatan ini. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, penulis mengajukan pertanyaan kepada isteri apakah mereka ikut terlibat dalam pembicaraan antara suami pertama dengan suami kedua. Jawaban dari para isteri terhadap pertanyaan yang penulis ajukan dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XII
PENGAKUAN ISTERI TENTANG KETERLIBATANNYA DALAM
KESEPATAN YANG DILAKUKAN SUAMINYA

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Ya	-	0 %	-	0 %
2.	Tidak	5	100 %	5	100 %
3.	Menolak Menjawab	-	0 %	-	0 %

Dari tabel di atas dapat diketahui, bahwa isteri tidak ikut terlibat dalam pembicaraan antara suami pertama dan suami kedua. Akan tetapi, sebelumnya sudah ada pembicaraan antara suami pertama dengan isteri. Jadi, walaupun isteri tidak ikut dalam pembicaraan, tetapi pada hakikatnya isteri ikut terlibat dan menyetujui kesepakatan tersebut.

Kembalinya seorang suami kepada isterinya yang telah diceraikan, ada beberapa motivasi yang melatarbelakanginya. Ada karena factor perasaan (masih sayang sama isteri) dan yakin bahwa hubungan mereka akan bisa mereka perbaiki kalau mereka bersatu lagi, ada karena pertimbangan anak-anak dan lain sebagainya. Untuk mengetahui motivasi suami untuk kembali lagi kepada isteri yang telah ditalak tiga dalam penelitian ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XIII
MOTIVASI SUAMI PERTAMA UNTUK KEMBALI KEPADA
MANTAN ISTERINYA

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Pertimbangan Anak-anak	4	80 %	4	80 %
2.	Karena Masih Sayang	1	20 %	-	0 %
3.	Ingin Memperbaiki Rumah Tangga	-	0 %	1	20 %
4.	Dll	-	0 %	-	0 %

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa anak-anak merupakan faktor yang dominan dalam kasus kembalinya suami pertama kepada isterinya. 80 % dari suami, baik yang berasal dari Desa Pangkalan maupun yang berasal dari Desa Muara Petai, mengaku bahwa kebaikan dan masa depan anak-anak lah yang membuat mereka kembali lagi kepada isterinya. Mereka yakin bahwa masa depan anak-anak mereka akan lebih baik apabila diasuh oleh ayah dan ibu kandung mereka. Mereka juga mengatakan sangat sulit bagi mereka untuk berpisah dengan anak-anak yang sangat mereka sayangi, walaupun tidak ada yang menampik bahwa mereka masih sayang kepada isterinya, akan tetapi faktor anaklah yang lebih dominan.

B. Persepsi Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Upah Talak Di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai

Sebagaimana disinggung sebelumnya, *Upah Talak* merupakan sesuatu yang sudah sering terjadi di tengah masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai. Untuk itu menarik untuk dikaji lebih lanjut bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek *Upah Talak* itu sendiri. Karena sudah sering terjadi, pada umumnya masyarakat sudah mengerti dan paham dengan apa yang disebut dengan *Upah Talak*. Dari angket yang penulis sebar di kedua desa tersebut, didapatkan jawaban dari responden sebagai berikut :

TABEL XIV
PEMAHAMAN MASYARAKAT
TENTANG PRAKTEK UPAH TALAK

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Paham	50	100 %	50	100 %
2.	Tidak Paham	-	0 %	-	0 %
3.	Menolak Menjawab	-	0%	-	0 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa pada umumnya masyarakat sudah mengerti dengan praktek *Upah Talak*, bahkan beberapa di antaranya mengaku sudah pernah melihat langsung pelaksanaan nikah *Upah Talak* itu sendiri. Berbagai persepsi atau tanggapan muncul dari masyarakat terhadap praktek *Upah Talak* itu sendiri. Ada yang beranggapan bahwa praktek ini tidak baik dan bertentangan dengan ajaran agama, dan ada yang beranggapan

bahwa praktek *Upah Talak* ini biasa saja (tidak jelek walaupun tidak bisa dikatakan baik). Untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap praktek *Upah Talak* ini dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

TABEL XV
PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PRAKTEK UPAH
TALAK

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Baik (Tidak Buruk)	13	26 %	29	58 %
2.	Tidak Baik	34	68 %	19	38 %
3.	Tidak Tahu	3	6 %	2	4 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bagaimana pandangan masyarakat kedua desa terhadap permasalahan ini. 68 % dari responden yang berasal dari Desa Pangkalan mengatakan bahwa praktek *Upah Talak* ini bertentangan dengan ajaran agama. 26 % menjawab tidak bertentangan, sisanya sebanyak 6 % menjawab tidak tahu. Sementara penilaian yang sedikit berbeda dikemukakan oleh warga Desa Muara Petai, di mana masyarakat yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut tidak buruk lebih banyak dibandingkan masyarakat yang mengatakan bahwa pernikahan tersebut buruk. Penilaian masyarakat yang mengatakan bahwa *Upah Talak* itu tidak baik didasarkan atas pandangan bahwa pernikahan semacam ini adalah pernikahan akal-akalan saja atau pernikahan yang direkayasa oleh pihak tertentu,

persekongkolan antara suami pertama dengan suami kedua.¹² Di samping itu, mereka juga menilai bahwa seseorang yang mau menikahi seorang wanita lalu menceraikannya karena mengharapkan imbalan (upah), dianggap seorang yang tidak punya harga diri, karena pernikahan sesungguhnya pernikahan adalah sesuatu yang sakral dan suci yang tidak bisa dinilai dengan uang, apalagi dipermainkan.¹³

Sebagian masyarakat ada yang mengatakan bahwa pernikahan dengan *Upah Talak* ini adalah suatu hal yang dianggap tidak buruk. Mereka beralasan bahwa, ketika seorang suami yang telah mentalak istrinya dengan talak tiga, dan ia merasa menyesal atas sikapnya itu, sehingga ingin kembali kepada istrinya yang telah ditalaknya, dengan niat suci dan tulus untuk kembali membina rumah tangga, mendidik dan memelihara anak-anaknya untuk meraih masa depan yang dicita-citakannya sesuai dengan harapan anak-anaknya, tentunya cara ini merupakan satu-satunya jalan yang harus ditempuh dan dijalani oleh mereka. Dan keinginan mereka yang tulus untuk kembali membangun dan membina rumah tangga serta membesarkan anak-anaknya adalah suatu hal yang harus didukung dan dipertimbangkan¹⁴.

Pandangan atau persepsi masyarakat di atas, tentu dipengaruhi oleh beberapa hal. Salah satunya adalah pemahaman mereka tentang ajaran agama. Di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, pengajian atau wirid agama dalam

¹² Harmizon (Warga Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 25 Oktober 2008.

¹³ Jasri (Warga Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 1 November 2008.

¹⁴ Lukman (Warga Desa Muara Petai), *Wawancara*, Desa Muara Petai, 8 November 2008.

rangka memberikan pemahaman tentang agama itu biasanya dilaksanakan di masjid dalam jangka waktu yang berkala, seperti wirid pengajian yang diadakan sekali dalam seminggu. Dalam wirid tersebut sangat jarang sekali dibahas masalah pernikahan. Untuk mengetahui apakah masalah hukum *Nikah Talak* ini pernah dibahas oleh penceramah, dapat dilihat dari pengakuan masyarakat dalam tabel di bawah ini :

TABEL XVI
APAKAH MASALAH UPAH TALAK PERNAH DISINGGUNG
DALAM CERAMAH AGAMA

No	Alternatif Jawaban	Desa Pangkalan		Desa Muara Petai	
		Jumlah	Persentase	Jumlah	Persentase
1.	Ya	41	82 %	35	70 %
2.	Tidak	-	0 %	-	0 %
3.	Tidak Tahu	9	18 %	15	30 %

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa tidak sekalipun penceramah membahas tentang hukum *Upah Talak*. Permasalahan yang banyak dibahas dalam kajian-kajian yang disampaikan oleh para muballigh biasanya hanya berkutat dalam masalah akhlak atau dalam masalah ibadah mahdhah seperti shalat, puasa dan lain sebagainya.¹⁵ Hal ini, menurut hemat penulis, membuat masyarakat bersikap tidak terlalu acuh dengan praktek *Upah Talak* ini, walaupun ada yang beranggapan tidak baik, akan tetapi ungkapan tidak baik itu tidak pernah keluar dari mulut masyarakat.

¹⁵ Ramli (Pengurus Masjid), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 26 Oktober 2008.

Menurut Syahril, salah seorang alim ulama di Desa Pangkalan, hal ini sengaja tidak ia singgung dalam pengajian, karena menurutnya hukum *Upah Talak* itu sendiri masih diragukan, apakah diperbolehkan atau tidak. Di samping itu ia merasa khawatir kalau itu disinggung akan menyinggung pihak-pihak tertentu sehingga akan menjurus kepada permusuhan pribadi antara dirinya sebagai penceramah dengan orang-orang yang merasa tersinggung dengan isi ceramahnya.¹⁶

Sementara itu Jusuf, Muballigh lain, mengemukakan alasan lain. Menurutnya permasalahan-permasalahan hukum seperti itu kurang menarik minat masyarakat. Masyarakat lebih tertarik dengan pengajian masalah akhlak atau ibadah mahdhah dan dikaitkan dengan kehidupan sesudah mati (permasalahan alam kubur atau keadaan akhirat). Sehingga sebenarnya permasalahan ini tidak pernah disinggung karena tuntutan ataupun masyarakat sendiri tidak menginginkannya. Bukan hanya permasalahan *Upah Talak*, tapi banyak lagi permasalahan lain dalam hal-hal Mu'amalat yang tidak pernah disinggung oleh para Muballigh di dua desa ini.¹⁷

C. Analisa (Tinjauan Hukum Islam)

1. Perbandingan

Dari data-data yang penulis paparkan di atas, dapat ditangkap bahwa tidak ada hal-hal yang secara substantif dan prinsipil yang membedakan antara *Upah Talak* yang terjadi di Desa Pangkalan dengan *Upah Talak* yang terjadi di Desa Muara Petai. Dari pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan, baik

¹⁶ Syahril (Muballigh Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 19 Oktober 2008.

¹⁷ Jusuf (Muballigh Desa Pangkalan), *Wawancara*, Desa Pangkalan, 22 Oktober 2008.

melalui wawancara dengan pelaku *Upah Talak*, maupun melalui angket yang penulis sebarakan kepada masyarakat, tampak tidak ada perbedaan-perbedaan yang mencolok dari jawaban yang mereka berikan. Kalaupun ada perbedaan itu hanyalah perbedaan yang sangat tipis sekali yang tidak memberikan perbedaan yang signifikan.

Hal ini, menurut hemat penulis, disebabkan karena kesamaan latar belakang suku dan adat istiadat yang berkembang, kesamaan taraf pendidikan masyarakat di dua desa serta yang paling menentukan letak geografis kedua desa yang sangat berdekatan (berbatasan) sehingga apa yang terjadi di satu desa dengan mudah dan cepat bisa diketahui oleh desa yang lainnya.

Dari pemaparan ini mengantarkan penulis kepada sebuah kesimpulan, bahwa pola *Upah Talak* yang telah penulis paparkan dalam tulisan ini setidaknya memberikan gambaran, bahwa praktek seperti itulah yang terjadi di Kecamatan Kuantan Mudik Kab. Kuantan Singingi. Kesimpulan ini penulis dapatkan dari data yang penulis peroleh dari dua desa, yang merupakan dua desa yang ada di Kecamatan Kuantan Mudik.

2. Tinjauan Hukum Islam¹⁸

Setelah memaparkan dan mengamati hasil penelitian penulis tentang pelaksanaan *Upah Talak* di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, penulis

¹⁸ Term Hukum Islam merupakan khas Indonesia yang penggunaan kesehariannya mengandung *ambiguitas* (kerancuan), yaitu sebagai padanan syari'ah (hukum yang diwahyukan Allah yang tertuang dalam Al-Qur'an dan Hadits, yaitu Al-Qur'an dan kitab-kitab Hadits) di satu sisi dan sebagai padanan fiqhi (norma-norma hukum hasil olahan syari'ah oleh para ulama) di pihak lain. Karena itu diperlukan penjelasan yang proporsional, agar ambiguitas itu tidak menimbulkan kesalahpahaman. Adapun hukum Islam yang penulis maksudkan dalam tulisan ini adalah pengertian kedua, yaitu ijtihad para ulama yang didasarkan kepada sumber syariat dalam menilai suatu permasalahan. Lihat Ahmad Rafiq, *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia*, (Yogyakarta : Gema Media, 2001), cet Ke-1, h. 13

berkesimpulan bahwa praktek *Upah Talak* yang dikenal dalam masyarakat kedua desa tersebut merupakan Nikah Tahlil yang dikenal dalam terminologi hukum Islam. Dengan demikian *Upah Talak* ini termasuk salah satu bentuk pernikahan yang dilarang oleh agama karena pada hakikatnya *Upah Talak* itu adalah Nikah Tahlil.

Penyamaan (pengkategorian) pernikahan *Upah Talak* ini dengan nikah tahlil didasarkan kepada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

- a. Adanya kesepakatan antara pihak suami pertama dengan pihak suami kedua, hal ini juga diikuti dengan kondisi bahwa istri mengetahui atau terlibat, baik langsung maupun tidak langsung, dalam kesepakatan tersebut sebagai mana data-data yang telah penulis paparkan di atas,
- b. Dari segi kebahasaan, *Upah Talak* berarti memberikan upah (imbalan uang) kepada seseorang untuk melakukan talak, dari arti kebahasaan ini serta data yang penulis paparkan tentang uang yang diterima oleh suami kedua dari suami pertama di atas, dapatlah ditangkap apa yang menjadi motivasi atau tujuan seseorang atau mereka melakukan pernikahan tersebut, tidak ada rencana yang mulia untuk membangun rumah tangga yang bahagia sebagaimana digariskan oleh Islam. Dari sini juga dapat diketahui bahwa sudah ada rencana dari suami kedua untuk menceraikan isteri yang dinikahinya sebelum akad nikah itu dilaksanakan, dan hal ini merupakan hal yang dilarang oleh agama,
- c. Umumnya dari pernikahan yang dilaksanakan tersebut tidak menghasilkan keturunan, di samping pernikahan yang dilaksanakan tersebut berumur

sangat singkat sekali. Hal ini mendukung dugaan di atas, bahwa ada maksud lain dari mereka yang menikah selain membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagai mana yang telah digariskan oleh Islam.

Dari alasan-alasan yang penulis kemukakan di atas, dapat dikatakan bahwa praktek pernikahan *Upah Talak* merupakan praktek nikah tahlil, hanya saja masyarakat tidak memakai istilah nikah tahlil untuk menggambarkan masalah tersebut. Hal ini, menurut hemat penulis, disebabkan oleh penghalusan bahasa, karena dari dulunya masyarakat Kuantan Mudik, sebagaimana masyarakat Kabupaten Kuantan Singingi pada umumnya, dikenal sebagai masyarakat yang mempunyai bahasa yang tinggi dan halus. Penghalusan bahasa ini pada akhirnya berakibat kepada kaburnya istilah *Upah Talak* itu sendiri, sehingga menyebabkan masyarakat tidak mengetahui bahwa praktek *Upah Talak* yang dikenal di tengah masyarakat merupakan praktek nikah tahlil yang dikenal dalam istilah syara'. Hal ini dibenarkan oleh Tuali Datuk Panglimo Sutan, menurutnya banyak istilah-istilah syara' yang telah dialih bahasakan menjadi istilah adat. Karena pada dasarnya adat yang dipakai dalam masyarakat Kuansing adalah adat yang bersandarkan kepada syara'. Sesuai dengan falsafah adat yang mengatakan adat bersendikan syara', syara' bersendikan kitabullah¹⁹. Tetapi dalam perkembangannya, banyak masyarakat yang tidak tahu bahwa *Upah Talak* yang dikenal di tengah masyarakat adalah nikah tahlil itu sendiri. Bahkan kebanyakan masyarakat tidak tahu apa yang

¹⁹ Tuali Dt Panglimo Sutan (Ninik Mamak Persukuan Domo), *Wawancara*, Desa Kuantan Mudik, 27 Oktober 2008.

dimaksud dengan nikah tahlil dan bagaimana hukumnya menurut Islam. Namun, pernikahan *Upah Talak* ini bukanlah adat yang bersendikan syara' (adat yang sebenar adat), melainkan suatu adat yang teradat.

Dari pemaparan di atas, dapatlah diketahui bahwa hukum *Upah Talak* adalah haram dan termasuk dosa besar sebagai mana hukum nikah tahlil. Banyak hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang keburukan nikah tahlil itu sendiri, antara lain :

عن ابن مسعود رضى الله عنه قال لعن رسول الله المحلل و
المحلل له (رواه احمد و النسائي و الترمذى و صححه)

Artinya : “Dari Ibnu Mas’ud RA, ia berkata : Rasulullah SAW mengutuk

Muhallil dan Muhallal Lah”. (HR. Ahmad, Nasa’I dan Turmudzi.

Hadis ini saheh menurut Turmudzi).²⁰

عن عقبة بن عامر رضى الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه
وسلم: ألا أخبركم بالتيس المستعار؟ قالوا: بلى, وهو المحلل, لعن الله
المحلل والمحلل له (رواه ابن ماجه والحاكم)

Artinya: “Dari Uqbah bin Amir r.a, ia berkata: Rasulullah saw telah bersabda:

Maukah aku ceritakan tentang kehormatan yang dipinjamkan?

Mereka menjawab: mau, dan itulah si Muhallil, Allah telah mengutuk

muhallil dan Muhallala lah.” (HR. Ibnu Majah dan Hakim)²¹

Dalam hadis lain yang diriwayatkan Dari Ibnu Abbas, Rasulullah pernah ditanya tentang Muhallil, lalu ia menjawab : Tidak boleh. Kawin itu harus

²⁰ Muhammad ibn Isya al-Turmudzi, *Sunan Turmudzi*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), Juz 3, h. 427.

²¹ Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), juz 1, h. 623.

benar-benar merasakan madu kecilnya.²²

Di samping hadis-hadis di atas, Umar ibn Khattab juga pernah berkata “Kepada Muhallil dan Muhallal lah tidak diberikan hukuman kecuali hukuman rajam bagi keduanya”. Ibnu Umar, anak beliau, juga pernah ditanya tentang Nikah Tahlil, jawabnya “kedua-duanya berzina”.²³

Hadits di atas, menjelaskan bahwa nikah tahlil merupakan suatu dosa besar dan perbuatan yang diharamkan oleh Rasulullah saw dan pelakunya mendapat laknat dari Allah swt. Hal ini sudah menjadi kesepakatan di kalangan ulama fiqih. Akan tetapi para ulama berbeda pendapat mengenai sah atau tidaknya pernikahan tersebut. Perbedaan ini disebabkan karena perbedaan pandangan mereka mengenai keberadaan niat sewaktu dilangsungkannya akad nikah.

Menurut Imam Syafi’I, nikah tahlil sah apabila dalam akad nikah tidak disebutkan maksud atau tujuan dari pihak yang menikah, bahwa ia bertujuan untuk menghalalkan si wanita bagi suaminya yang pertama.²⁴ Jadi dalam masalah ini, Syafi’I, di samping syarat dan rukun nikah yang ada, memberikan syarat sebagai berikut : (a) tidak disebutkan dalam akad bahwa suami kedua tersebut berniat untuk menghalalkan istrinya tersebut bagi suaminya yang pertama, seperti kata-kata : “Saya nikahi si A untuk menghalakannya kepada

²² *Ibid.* h. 65.

²³ *Ibid.*

²⁴ Sayyid sabiq, *Fikih Sunnah* (terj), (Bandung : PT al-Ma’arif, 1987), juz 6, cet.ke-4, h. 74.

bekas suaminya” atau kata-kata yang semakna dengan itu, (b) tidak adanya ketentuan batas waktu, seperti ia menikahnya dalam sebulan dan sebagainya, sebab apabila hal itu dilakukan, maka nikah tersebut tergolong kepada nikah kontrak, (c) harus terjadi hubungan suami isteri antara suami kedua dan isterinya serta isteri menjalani masa iddah setelah diceraikan.²⁵ Dengan demikian, praktek *Upah Talak* sah menurut syara’ apabila kita merujuk kepada pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi’i di atas, karena syarat yang dikemukakan oleh imam Syafi’i di atas, yaitu tidak adanya batas waktu dan tidak disebutkan niat suami kedua pada saat berlangsungnya akad, telah terpenuhi dalam pernikahan tersebut. Hanya saja praktek *Upah Talak* ini haram dilakukan. Dan kembalinya suami pertama kepada isterinya sangat tergantung apakah isteri pernah melakukan hubungan suami isteri dengan suaminya yang kedua.

Imam Abu Hanifah berpendapat, bahwa akad nikah dalam nikah tahlil sah sekalipun niat untuk menghalalkan wanita bagi suaminya yang pertama disebutkan dalam akad tersebut, bahkan sah kalau seandainya dalam akad nikah tersebut disyaratkan bahwa nikah tersebut dibatasi oleh batas waktu, dan suami pertama boleh kembali kepada bekas istrinya tersebut.²⁶ Imam Abu Hanifah mengemukakan pendapat demikian dengan pertimbangan bahwa syarat atau niat yang dikemukakan dalam akad nikah tersebut dengan

²⁵ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996), cet. Ke-1, h. 1348.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 74.

sendirinya batal, sehingga akad nikahnya menjadi sah.²⁷ Dengan demikian pernikahan *Upah Talak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai dianggap sah menurut syara' jika merujuk kepada pendapat Imam Abu Hanifah ini, dan pada dasarnya, bekas suami pertama boleh kembali kepada bekas istrinya apabila syarat-syarat yang dikemukakan oleh Rasulullah saw dalam salah satu haditsnya, yaitu terjadinya hubungan suami istri antara wanita tersebut dengan suami yang kedua, telah terjadi dalam pernikahan tersebut. Tetapi pada umumnya, pernikahan yang diduga kuat sebagai pernikahan *Upah Talak* yang terjadi dalam masyarakat dua desa tersebut di atas, tidak menghasilkan keturunan, hal ini memunculkan dugaan bahwa mereka tidak melakukan hubungan suami istri, karena pada kenyataannya, kedua belah pihak telah pernah menghasilkan keturunan pada perkawinan tersebut (tidak adanya penyakit atau kemandulan yang menghalangi mereka untuk punya keturunan).

Menurut pendapat Maliki dan Hanbali, perkawinan yang dilakukan antara suami kedua dengan sang wanita dengan niat tahlil, baik niat itu disebutkan atau tidak disebutkan (dalam hati saja), maka perkawinan tersebut tidak syah.²⁸ Pernikahan seorang wanita yang telah ditalak tiga dengan suaminya yang kedua baru dianggap sah apabila memenuhi hal-hal (a) tidak melakukan pernikahan dengan niat menghalalkan suami pertama, (b) memenuhi syarat dan rukun, (c) suami kedua beragama Islam, (d) wanita tersebut bukan anak kecil

²⁷ Abdul Aziz Dahlan (ed), *Op.Cit.*, h.1348.

²⁸ *Ibid.*

yang belum bisa melakukan hubungan kelamin, (e) telah terjadi hubungan kelamin antara keduanya, (f) tidak ada halangan yang bersifat hukum yang menghalangi terjadinya hubungan kelamin tersebut, (g) mereka berdua tidak mengingkari hubungan kelamin tersebut, dan (h) Mazhab Maliki menambahkan syarat suami kedua harus sudah baligh.²⁹

Jadi berdasarkan pemaparan di atas, berdasarkan data-data yang telah penulis kemukakan tentang indikasi adanya niat pelaku perkawinan mamupui talak untuk menghalalkan sang wanita bagi suaminya yang pertama. Maka pernikahan *Upah Talak* tidak sah jika merujuk kepada pendapat Maliki dan Hanbali. Tidak sahnya pernikahan ini juga berakibat tidak bolehnya suami pertama kembali kepada bekas istrinya.

Menurut Abu Yusuf, salah seorang murid utama imam Abu Hanifah, pernikahan tahlil ini hukumnya batal, karena pernikahan seperti ini termasuk kawin sementara. Pendapat ini agak mirip dengan pendapat dalam mazhab Maliki dan hanbali di atas, jadi dengan demikian, pernikahan mamupui talak yang berlaku dalam masyarakat Kuantan Mudik, tidak sah jika merujuk kepada pendapat imam Abu Yusuf ini. Tetapi Imam Muhammad, salah seorang Ulama mazhab Hanafi yang lain, berpendapat bahwa akad perkawinan antara wanita dengan suami yang kedua syah, tetapi perempuannya tidak halal lagi bagi suaminya yang pertama³⁰.

²⁹ *Ibid*, h. 1349.

³⁰ Sayyid Sabiq, *Op.Cit.*, h. 78.

Semua pendapat para ulama tersebut didasari atas pandangan mengenai posisi niat dalam dan sewaktu akad nikah berlangsung. Imam Syafi'i tidak mengutamakan adanya niat dalam pernikahan tahlil, sementara pendapat Imam Malik, dengan adanya unsur atau indikasi bahwa pernikahan itu diduga pernikahan tahlil, maka dengan sendirinya pernikahan itu dinamakan pernikahan tahlil dan pernikahannya dipandang batal.

Salah satu dari kaidah yang lima menjelaskan bahwa sesuatu yang akan dilaksanakan itu tergantung kepada niat/ apa yang menjadi dari tujuan:

الامور بمقاصدها

Artinya: Segala sesuatu (perbuatan) tergantung pada tujuannya.³¹

Dari pemaparan di atas, penulis berpendapat, bahwa pernikahan *Upah Talak* yang terjadi dalam masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun dalam permasalahan ini ulama berbeda pendapat tentang sah atau batalnya, tetapi para ulama telah sepakat bahwa hukum nikah tahlil adalah haram berdasarkan hadis-hadis nabi yang dikemukakan di atas.

³¹ Drs. H. Abdul Mudjib, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqhi*, (Surabaya: Kalam mulia, 1996), Cet ke-2, h. 10.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan bab-bab sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. *Upah Talak* yang dilaksanakan di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai adalah pernikahan yang dilaksanakan oleh seorang laki-laki dengan seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya dengan tujuan ia akan menceraikan wanita tersebut setelah akad nikah dilaksanakan sehingga wanita tersebut kembali halal bagi suaminya yang pertama dan laki-laki tersebut mendapatkan imbalan jasa (*upah*) atas apa yang dilakukannya itu,
2. Tidak ada perbedaan yang signifikan dalam pelaksanaan *Upah Talak* antara Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai, perbedaan hanya terdapat pada tempat pelaksanaan pernikahan *Upah Talak*. Warga Desa Pangkalan biasanya melaksanakan pernikahan tersebut di luar desanya, sementara warga Desa Muara Petai melaksanakan pernikahan tersebut di desanya sendiri. Perbedaan ini diakibatkan oleh perbedaan persepsi Masyarakat di kedua desa dalam memandang praktek *Upah Talak*. Masyarakat Desa Pangkalan pada umumnya memandang bahwa *Upah Talak* itu adalah perbuatan yang tidak baik dan bertentangan dengan agama. Sementara warga Desa Muara Petai sebagian besar berpendapat bahwa *Upah Talak* bukanlah perbuatan yang buruk, bahkan baik karena sudah ikut membantu

menyatukan keluarga yang sudah terpecah. Dengan demikian, persepsi masyarakat Desa Pangkalan lebih sesuai dengan hukum Islam dibandingkan persepsi masyarakat Desa Muara petai terhadap praktek *Upah Talak*,

3. *Upah Talak* yang dilakukan oleh masyarakat Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai adalah nikah tahlil yang dilarang oleh agama.

B. Saran

Dari pemaparan di atas, ada beberapa saran yang menurut penulis perlu dipertimbangkan oleh berbagai pihak, yaitu :

1. Alim Ulama dan para Muballigh diharapkan bisa memberikan ceramah agama yang berkaitan dengan hukum Islam, terutama permasalahan-permasalahan yang berkaitan atau terjadi langsung di tengah masyarakat,
2. Pemuka atau tokoh masyarakat serta pemuka adat diharapkan bisa memberikan tuntunan dan aturan yang tidak bertentangan dengan ajaran agama di tengah masyarakat, untuk itu dibutuhkan pemahaman yang benar tentang agama,
3. Mahasiswa Islam, terutama mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum dan peneliti di bidang hukum Islam, diharapkan dapat mengkaji dan meneliti permasalahan yang terjadi di tengah masyarakat dan memberikan jawabannya kepada masyarakat sesuai dengan syari'at Islam

DAFTAR PUSTAKA

- Ayyub, Hasan, *Fikih Keluarga*, (Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2005), cet. Ke-5
- Bukhari, Muhammad ibn Isma`il Abu Abdullah al-, *Shahih al-bukhari*, (Beirut : Dar Ibnu Katsir, 1987), juz 5
- Dahlan, Abdul Aziz (ed), *Ensiklopedi Hukum Islam*, (Jakarta : PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996)
- Damasyqi, Muhammad ibn Abdurrahman al-, *Fiqih Empat Mazhab*, (terj.), (Bandung : Hasyimi Press, 2004)
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Jakarta : Yayasan Penyelenggaraan Penterjemahan dan Penafsiran al-Qur'an, 1997), cet. Ke-9
- _____, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : Dirjen Bimbingan Islam, 1992)
- Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Depag RI, *Pedoman Penghulu*, (Jakarta : Dirjen Bimas Islam, 2008)
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta : Departemen Agama RI, 2001)
- Faridl, KH. Miftah, *150 Masalah Nikah dan Keluarga*, (Jakarta : Gema Insani Press, 1999)
- Fauzan, Saleh al-, *Fiqih Sehari-hari*, (terj.), (Jakarta : Gema Insani Press, 2006)
- Ghazaly, Abd. Rahman, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta : Prenada Media, 2003)
- Ibnu Majah, Muhammad ibn Yazid al-Qazwini, *Sunan Ibnu Majah*, (Beirut : Dar al-Fikr, tt), juz 1
- Jaziri, Abdurrahman al-, *Kitab al-Fiqh `Ala al-Mazahib al-Arba`ah*, (Kairo : Maktabah al-Tijarah Kubrah, 1979), juz 4
- Malo, Manasse, *Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta : LP FISIP UI, 1987), cet. Ke-6
- Maraghi, Ahmad Mushtafa al-, *Tafsir al-Maraghi*, (terj), (Semarang : Toha Putra, 1993), juz 2

- Mas'ud, H. Ibnu dk, *Fiqih Mazhab Syafi'i*, (Bandung : Pustaka Setia, 2000)
- Muchtar, Kamal, *Asas-asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1974)
- Mughniyah, Muhamad Jawad, *Fiqhi Lima Mazhab*, (Jakarta: PT. Lentera, 2005), Cet ke-3
- Munawwir, Ahmad Warson, *Kamus al-Munawwir*, (Surabaya : Pustaka Progressif, 1997), cet. Ke-4
- Muslim ibn al-Hajjaj al-Naysaburi, *Shoheh Muslim*, (Darr Ihya At-Tirats Al-Arabi, tt), Juz 2
- Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama, *Ilmu Fiqih Jilid II*, (Jakarta : Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Depag. RI, 1984)
- Qardhawi, Yusuf, *Pengantar Kajian Islam*, (terj), ((Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 1997)
- Rafiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 1998)
- Rasid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung : Sinar Baru Algesindo, 2005), cet.ke-25
- Redaksi Sinar Grafika, *Undang-Undang Pokok Perkawinan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2004), cet. Ke-5
- Rifa'i, M., *Ilmu Fiqih Islam Lengkap*, (Semarang : CV. Toha Putra, 1978)
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah* (terj), (Bandung : al-Ma`arif, 1980), juz 6, cet. Ke-1
- _____, *Fiqih Sunnah* (terj), (Bandung : al-Ma`arif, 1980), juz 8, cet. Ke-1
- Saleh, K. Wantjik, *Hukum Perkawinan*, (Jakarta : Ghalia Indonesia, 1997)
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Fikih*, (Jakarta : Kencana, 2003), h. 104.
- Turmudzi, Muhammad ibn Isya al-, *Sunan Turmudzi*, (Beirut : Dar Ihya al-Turats al-Arabi, tt), Juz 3
- Zuhaili, Wahbah, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, (Damaskus : Dar el-Fikr, 1985), juz 7, cet. Ke-2

DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Pangkalan	16
Tabel 2 Sarana Pendidikan di Desa Pangkalan	18
Tabel 3 Rumah Ibadah di Desa Pangkalan	19
Tabel 1 Jumlah Penduduk Desa Muara Petai.....	16
Tabel 2 Sarana Pendidikan di Desa Muara Petai	18
Tabel 3 Rumah Ibadah di Desa Muara Petai	19
Tabel 7 Kasus Pernikahan Upah Talak di Desa Pangkalan tahun 2000-2008	64
Tabel 5 Kasus Pernikahan Upah Talak di Desa Muara Petai tahun 2000-2008	66
Tabel 6 Lokasi Pelaksanaan Pernikahan Upah Talak	69
Tabel 7 Usia Pernikahan Upah Talak	71
Tabel 8 Pengakuan Suami Kedua Tentang Kesepakatannya Dengan Suami Pertama	72
Tabel 9 Pengakuan Isteri Tentang Keterlibatannya Dalam Kesepakatan Yang Dilakukan Oleh Suaminya	73
Tabel 10 Motivasi Suami Pertama Untuk Kembali Kepada Mantan Isterinya	74
Tabel 11 Pemahaman Masyarakat Tentang Praktek Upah Talak	75
Tabel 12 Pandangan Masyarakat Tentang Praktek Upah Talak ..	76
Tabel 13 Apakah Masalah Upah Talak Pernah Disinggung Dalam Ceramah Agama	78

Nama :	Umur :
Jenis Kelamin :	Pekerjaan :

- ❖ Angket ini dipergunakan untuk keperluan ilmiah
- ❖ Berilah tanda silang (X) pada salah satu guruf, a, b, c, atau d yang anda anggap benar
- ❖ Setelah diisi Angket Penelitian ini harap dikembalikan
- ❖ Kejujuran Bapak/Ibu/Sdr alam menjawab Angket ini merupakan keberhasilan kami dalam mengumpulkan data yang ada

1. Apakah Bapak/ibu/Sdr tahu/mengerti tentang praktek *Upah Talak*?
 - a. Ya
 - b. Tidak
2. Apakah Bapak/ibu/sdr pernah melakukan praktek *Upah Talak*?
 - a. Pernah
 - b. Tidak pernah
3. Jika jawaban no. 2 adalah Ya (pernah), apa motivasi Bapak/Ibu/Sdr melaksanakannya?*

- a. Pertimbangan Anak-anak
- b. Ingin memperbaiki Hubungan
- c. Masih Sayang Isteri
- d.

X

4. Apakah ada pihak keluarga Bapak/Ibu/Sdr yang pernah melakukan *Upah Talak*?
 - a. ada
 - b. tidak ada
 - c. tidak tahu
5. Apakah Bapak setuju jika keluarga Bapak/Ibu/Sdr melakukan *Upah Talak*?
 - a. setuju
 - b. tidak setuju
 - c. tidak tahu
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah ada manfaat (nilai positif) yang dapat diambil dari pelaksanaan *Upah Talak* tersebut?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Upah Talak* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu
8. jika jawaban no. 7 adalah ya, dari mana Bapak/Ibu/Sdr tahu tentang hal itu?
 - a. dari ceramah ustadz(pengajian)
 - b. dari buku agama (bacaan)
 - c. dari acara TV/Radio
 - d.
9. Apakah ada ustadz yang menyinggung tentang hukum *Upah Talak* ini di daerah Bapak/Ibu/Sdr?
 - a. ada
 - b. tidak ada
 - c. tidak tahu
10. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Upah Talak* mempunyai dampak negatif?
 - a. Ya
 - b. Tidak
 - c. Tidak Tahu

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apakah Bapak/ibu/sdr tahu tentang praktek *Upah Talak*? Dari mana Bapak/Ibu/Sdr tahu dan bagaimana pendapat Bapak tentang *Upah Talak* itu sendiri?
2. Apakah Keluarga Bapak/ibu/sdr pernah melakukan *Upah Talak*? Setujukah Bapak/Ibu/Sdr dengan hal tersebut?kemukakan alasannya
3. Apakah ada pengarahan/pengajian yang diberikan para ustadz tentang *Upah Talak* ini di daerah Bapak/Ibu/Sdr? Jika ada apa kesimpulannya? Jika belum ada, perlukah pengajian itu dilakukan?apa alasannya?
4. Apakah Bapak/ibu/sdr pernah melakukan/ikut terlibat dalam pelaksanaan *Upah Talak*? Apa Saja keterlibatan dan yang Bapak/Ibu/Sdr lakukan dalam praktek *Upah Talak* tersebut? Apa motivasi Bapak/Ibu/Sdr melaksanakannya?
5. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah ada manfaat yang dapat diambil dari pelaksanaan *Upah Talak* tersebut? Apa saja keuntungannya dan dalam bidang apa saja?
6. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Upah Talak* tersebut tidak bertentangan dengan ajaran agama?bisakah Bapak/Ibu/Sdr mengemukakan alasannya?
7. Menurut Bapak/Ibu/Sdr, apakah praktek *Upah Talak* akan menimbulkan efek negatif? Apa saja itu?
8. Apakah Anda (suami kedua) pernah melakukan kesepakatan dengan mantan suami calon isteri anda sebelum melangsungkan pernikahan?

9. Apakah Anda (isteri) ikut terlibat dalam kesepakatan yang dilakukan suami pertama dan suami kedua anda?

PEDOMAN OBSERVASI

Mengamati praktek *UpahTalak* di Desa Pangkalan dan Desa Muara Petai Kecamatan Kuantan Mudik Kabupaten Kuantan Singingi, pengamatan terutama ditujukan kepada hal-hal yang berkaitan erat dengan penelitian, seperti tata cara pelaksanaan, siapa saja yang berperan dan terlibat, waktu dan tempat pelaksanaan dan lain-lain.